

**LAPORAN TAHUNAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
TAHUN 2025**



**JL. GEDONGKUNING 150A BANGUNTAPAN BANTUL
TELEPON: 0274 385192**

Daftar Isi

Daftar Isi	<i>i</i>
Kata Pengantar	<i>ii</i>
Ikhtisar Utama	<i>ii</i>
I. Laporan Manajemen	1
Laporan Direksi	1
Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris	7
II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif	13
III. Kepemilikan	19
IV. Perkembangan Usaha	20
V. Analisis dan Pembahasan Manajemen	24
VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia	33
VII. Laporan Keuangan Tahunan	49
VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik	59
Surat Pernyataan Kebenaran Laporan Keuangan Tahunan	60

Kata Pengantar

Laporan Tahunan 2025 ini merupakan dokumen komprehensif yang menampilkan kinerja PT BPR Chandra Muktiartha selama satu tahun, mulai 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Dokumen ini mencakup Laporan Keuangan Tahunan serta data umum Bank, disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan Pedoman Akuntansi yang berlaku bagi Bank Perekonomian Rakyat.

Tahun 2025 menandai fase penuh tantangan bagi industri perbankan, termasuk bagi PT BPR Chandra Muktiartha. Meski begitu, perusahaan ini berhasil melewati periode tersebut dengan cukup baik.

Secara kinerja keuangan, Perseroan mencatatkan pertumbuhan total aset sebesar -15.01%. Penyaluran Kredit Yang Diberikan (KYD) mengalami penurunan sebesar -25.61%, yang menunjukkan upaya ekspansi kredit perlu perhatian khusus. Dari sisi penghimpunan dana, Dana Pihak Ketiga (DPK), dengan tabungan meningkat sebesar 11.15% dan deposito turun sebesar -19.91%.

Permodalan Perseroan berada pada tingkat yang memadai, terlihat dari penurunan Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebesar 1.17% dari 15.31% menjadi 14.14%. Laba tahun berjalan juga menunjukkan penurunan -2.28% dibandingkan tahun sebelumnya.

Dari sudut pandang kualitas aset, rasio kredit bermasalah (Non- Performing Loan/ NPL) menunjukkan kenaikan sebesar 15.31% dari tahun 2024 sebesar 25.31 %menjadi 40.62% per 31 Desember 2025. NPL masih memerlukan perhatian khusus agar secara bertahap dapat diturunkan ke tingkat yang lebih sehat sesuai ketentuan regulator.

Perseroan menghadapi berbagai tantangan dan perubahan dinamis dengan melaksanakan langkah strategis guna meningkatkan kinerja secara berkelanjutan. (*Good Corporate Governance*), memperkuat penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, menegakkan efektivitas manajemen risiko, serta mempraktikkan prinsip kehati-hatian dalam perbankan prudensial (*prudential banking*). PT BPR Chandra Muktiartha juga terus merangsang inovasi, menambah efisiensi operasional, dan memperkuat kolaborasi di semua lini organisasi untuk mempersiapkan diri menghadapi perubahan.

Semua langkah strategis yang diambil ditujukan untuk memaksimalkan peluang yang tersedia, mendorong pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, dan menambah nilai bagi seluruh pemangku kepentingan PT BPR Chandra Muktiartha.

Ikhtisar Data Keuangan Penting / Key Financial Highlights

Pendapatan Operasional	Rp 42.961.265.971
Beban Operasional	Rp 40.990.275.307
Pendapatan Non Operasional	Rp 77.481.453
Beban Non Operasional	Rp 60.975.100
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	Rp 1.637.497.017

Rasio Keuangan / Financial Ratios

KPMM

14,14%

NPL Neto

34,63%

NPL Gross

40,62%

ROA

0,54%

BOPO

95,41%

NIM

3,60%

LDR

85,01%

Cash Ratio

8,61%



I. Laporan Manajemen

1. Laporan Direksi

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Pertama-tama, perkenankan kami mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan karunia-Nya, sehingga PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA berhasil melalui tahun 2025 yang terus berkembang dinamis dan penuh ketidakpastian dengan pertumbuhan dan kinerja yang cukup baik. Pencapaian ini sejalan dengan visi dan misi BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk menyediakan solusi perbankan bagi masyarakat khususnya nasabah Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk mendorong sektor usaha di Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

Strategi dan Kebijakan Strategis BPR

Sepanjang 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA tetap optimis namun berhati-hati dalam meningkatkan portofolio pinjaman sejalan dengan dinamika lingkungan usaha. Kami senantiasa disiplin dalam melakukan ekspansi kredit dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian Bank di tengah kondisi tantangan Industri BPR yang mengalami penurunan kualitas kredit.

Dalam mendukung pertumbuhan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui peningkatan kepuasan nasabah, keunggulan dan inovasi produk dan optimalisasi program marketing dana. Selain itu, pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas melalui peningkatan kompetensi di bidang pemasaran dan analisis kredit, layanan prima serta manajemen risiko. BPR CHANDRA MUKTIARTHA terus memperkuat penerapan tata kelola (GCG), kepatuhan terhadap regulasi dan peningkatan pemahaman terhadap model bisnis calon debitur yang hendak diakuisisi. Upaya ini dilakukan untuk memastikan keberlangsungan usaha BPR Digital tumbuh secara sehat dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, arah kebijakan strategis BPR CHANDRA MUKTIARTHA pada tahun 2025 difokuskan pada pencapaian pertumbuhan yang berkualitas (*quality growth*), memperluas basis nasabah dan penetrasi pasar secara selektif, menjaga rasio kredit bermasalah pada level yang terkendali, peningkatan efisiensi operasional melalui optimalisasi proses bisnis dan pemanfaatan teknologi, serta penguatan daya saing melalui inovasi produk dan layanan prima. BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan memperkuat tata kelola perusahaan dan manajemen risiko sesuai dengan ketentuan regulator.



Direksi memainkan peran sentral dalam membentuk strategi dan kebijakan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk memastikan keselarasan dengan Visi dan Misi Bank. Direksi menetapkan arah strategis yang jelas dan berkolaborasi dengan semua unit bisnis untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif, serta didukung oleh perangkat pendukung utama seperti kepegawaian, teknologi, infrastruktur, dan manajemen risiko. Implementasi strategi dipantau melalui monitoring berkala dan komunikasi berkelanjutan dengan unit kerja bisnis, fungsi pendukung, cabang, dan kantor kas. Penyesuaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika pasar. Direksi juga mendorong budaya dan nilai-nilai perusahaan untuk memperkuat kerja sama tim dan memastikan pelaksanaan Rencana Bisnis Bank yang efektif.

Pada tahun 2025, total portofolio pinjaman turun sebesar -25.61% tetapi kami optimis bahwa pertumbuhan kredit dan skala usaha BPR CHANDRA MUKTIARTHA dapat terus ditingkatkan secara berkelanjutan melalui penerapan strategi yang tepat sasaran melalui eksekusi bisnis yang disiplin.

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Sepanjang tahun buku 2025, PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA menunjukkan kinerja profitabilitas yang cukup baik. Hal ini tercermin dari pencapaian rasio keuangan utama, yaitu *Return on Assets* (ROA) sebesar 0,54% dan *Return on Equity* (ROE) sebesar 4,77%. Pertumbuhan kredit sebesar -25,61%, *Non-Performing Loan* (NPL) *Gross* sebesar 40,62%. Dari sisi efisiensi operasional, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berhasil mengendalikan biaya dengan baik, sebagaimana tercermin pada rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) sebesar 95,41%.

Pada akhir tahun 2025, PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga berhasil memenuhi dan melampaui sebagian besar target keuangan utama yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini mencerminkan kinerja manajemen yang solid dalam mengeksekusi strategi bisnis secara disiplin, serta kemampuan BPR CHANDRA MUKTIARTHA beradaptasi dalam menghadapi dinamika industri perbankan yang terus berkembang.

Indikator Keuangan	Target 2025	Realisasi
Pertumbuhan Kredit	2,23%	(25,61%)
NPL (<i>Gross</i>)	5,00%	40,62%
NPL (<i>Net</i>)	2,55%	34,63%
BOPO	83,20%	95,41%
<i>Return on Asset</i> (ROA)	2,16%	0,54%
<i>Return on Equity</i> (ROE)	19,34%	4,77%



Kendala, Tantangan dan Antisipasinya

Sepanjang tahun 2025, BPR CHANDRA MUKTIARTHA masih menghadapi dinamika perekonomian global, domestik dan regional serta Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditandai oleh ketidakpastian kebijakan moneter, serta meningkatnya persaingan likuiditas dan iklim usaha yang belum kondusif. Dalam kondisi tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA memfokuskan strategi penyaluran kredit pada pertumbuhan yang berkualitas melalui pendalaman ekosistem bisnis, penguatan disiplin risiko, serta optimalisasi kapabilitas yang telah dibangun pada periode sebelumnya.

Sebagai langkah antisipasi, BPR CHANDRA MUKTIARTHA menjalankan beberapa inisiatif utama sebagai berikut:

1. Penyempurnaan *end-to-end credit process* dengan melakukan perbaikan seluruh rangkaian proses kredit dari awal sampai selesai, mulai dari calon debitur mengajukan pinjaman hingga kredit tersebut lunas atau ditutup. Untuk meningkatkan kualitas portofolio kredit melalui penguatan manajemen risiko dan penerapan disiplin risiko yang konsisten di seluruh segmen.
2. Meningkatkan kualitas kredit eksisting dengan melakukan monitoring kredit yang ketat serta melakukan penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah.
3. Meningkatkan marketing funding untuk pertumbuhan DPK dalam rangka menopang ekspansi kredit, mempertebal NIM (*Net Interest Margin*) serta memperkuat likuiditas BPR CHANDRA MUKTIARTHA.
4. Pengembangan Kompetensi SDM dengan mengikutsertakan pegawai dan direksi mengikuti pelatihan teknis perbankan dan seminar yang relevan dengan ekonomi dan perbankan.
5. Peningkatan Kepatuhan dan Tata Kelola dengan memastikan seluruh kebijakan dan prosedur telah selaras dengan regulasi yang berlaku serta memperkuat fungsi pengawasan internal.

Penerapan Tata Kelola

Pada tahun 2025 BPR CHANDRA MUKTIARTHA menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*) secara konsisten sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan usaha. Penerapan GCG diarahkan untuk memastikan pengelolaan Perseroan dilakukan secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan wajar.

Direksi menjalankan fungsi pengelolaan operasional secara efektif dan bertanggung jawab atas pencapaian kinerja Perseroan, sementara Dewan Komisaris melaksanakan fungsi pengawasan secara independen guna memastikan kebijakan dan strategi telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam mendukung hal tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat fungsi pengendalian internal, manajemen risiko, serta kepatuhan terhadap regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hasil *Self Assessment* terhadap 12 Faktor Penerapan Tata Kelola berada pada **Peringkat Komposit 2 (Baik)**. Hal ini menunjukkan Manajemen BPR telah melakukan pelaksanaan tata



kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen BPR.

Dengan penerapan tata kelola yang baik, BPR CHANDRA MUKTIARTHA berupaya menjaga kepercayaan pemangku kepentingan serta mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Penerapan Manajemen Risiko

BPR CHANDRA MUKTIARTHA menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi sebagai bagian penting dalam menjaga stabilitas dan keberlangsungan usaha. Penerapan ini dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Perseroan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*) dan ketentuan regulator.

Manajemen risiko di BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencakup seluruh jenis risiko utama, antara lain risiko kredit, risiko operasional, risiko likuiditas dan risiko kepatuhan, risiko. Dalam implementasinya, BPR CHANDRA MUKTIARTHA mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan serta melakukan evaluasi secara berkala guna memastikan efektivitas pengendalian risiko yang selaras dengan pengaturan yang telah ditetapkan oleh OJK.

Direksi bertanggung jawab atas penerapan manajemen risiko secara menyeluruh, sementara Dewan Komisaris melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Untuk mendukung hal tersebut, BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga memperkuat fungsi manajemen risiko dan pengendalian internal, termasuk melalui penerapan *Risk and Control Self Assessment* (RCSA) serta pemantauan profil risiko secara berkala.

Dalam pengelolaan risiko kredit, Perseroan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui proses analisis kredit yang komprehensif, pemantauan kualitas aset, serta upaya penanganan dini terhadap potensi kredit bermasalah. Sementara itu, dalam pengelolaan risiko operasional, BPR CHANDRA MUKTIARTHA terus meningkatkan efektivitas sistem dan prosedur kerja guna meminimalkan potensi kesalahan dan gangguan operasional. Sedangkan dari sisi mitigasi risiko kepatuhan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA tunduk pada regulasi OJK, memenuhi kewajiban pelaporan dan komitmen yang telah dibuat dengan OJK.

Hasil Penilaian Profil Risiko pada Semester II 2025 menunjukkan bahwa Profil Risiko BPR CHANDRA MUKTIARTHA termasuk dalam **peringkat 3 (sedang)** dan memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan BPR, kemungkinan kerugian yang dihadapi BPR dari rata-rata tingkat Risiko inheren tergolong rendah selama periode waktu tertentu pada masa yang akan datang.



2. Rata-rata tingkat KPMR memadai. Dalam hal terdapat kelemahan minor, kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Melalui penerapan manajemen risiko yang efektif dan berkelanjutan, BPR CHANDRA MUKTIARTHA optimis dapat menjaga kinerja yang sehat, meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan, serta mendukung pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Tingkat Kesehatan Bank

Bank Chandra Muktiartha secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dan cakupan penilaian terhadap faktor profil risiko (*risk profile*), penerapan tata kelola (*good corporate governance*), rentabilitas (*earning*) dan permodalan (*capital*).

Self-Assessment TKB dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan OJK No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS dan Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.03/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS, dengan hasil akhir berupa Peringkat Komposit (PK).

Hasil *Self-Assessment* Tingkat Kesehatan BPR CHANDRA MUKTIARTHA secara Individu posisi 31 Desember 2025 berada pada **Peringkat Komposit 3 (PK-3)**. Hal ini mencerminkan BPR Chandra Muktiartha secara umum Cukup Sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif dari perubahan kondisi bisnis, faktor intern dan faktor eksternal, tercermin dari faktor-faktor penilaian Profil Risiko (peringkat 3), Penerapan Tata Kelola (peringkat 2), Rentabilitas (peringkat 4) dan Permodalan (peringkat 4). Terdapat kelemahan baik dari faktor intern maupun faktor ekstern namun kelemahan tersebut masih dapat diatasi oleh BPR dan BPR akan berusaha memperbaiki supaya menjadi lebih baik lagi.

Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

BPR CHANDRA MUKTIARTHA melaksanakan sistem pengendalian internal dalam proses Pelaporan Keuangan Bank untuk meningkatkan integritas pelaporan keuangan Bank sebagaimana yang diamanatkan dalam POJK No. 15 Tahun 2024. Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan BPR CHANDRA MUKTIARTHA bertujuan untuk: (1) memastikan kebenaran, keakuratan, dan transparansi atas Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan; (2) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional dalam proses pelaporan keuangan; (3) Memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses pelaporan keuangan; dan (4) Memastikan Laporan Keuangan telah disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.

Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan (PIPKu) dilaksanakan agar Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan semakin berintegritas. Terselenggaranya sistem



pengendalian internal Bank yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab Direksi. Selain itu, manajemen Bank juga berkewajiban untuk meningkatkan budaya sadar risiko (*risk awareness*) yang efektif pada organisasi Bank dan memastikan hal tersebut melekat di setiap jenjang organisasi serta melaksanakan penilaian terhadap pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank sesuai dengan pasal 8 ayat (3) POJK No. 15 Tahun 2024.

BPR CHANDRA MUKTIARTHA juga telah menyusun Laporan PIPKu Tahun 2025 dan melaporkannya ke OJK sebagai bagian dari Laporan Tahunan 2025. Laporan PIPKu BPR CHANDRA MUKTIARTHA dimaksud memuat:

1. Laporan Pengujian Atas Pos-pos pada Laporan Keuangan apakah sudah wajar dan dicatat sesuai dengan POJK yang mengatur tentang Pencatatan Transaksi dan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK-EP)
2. *Self Assessment* Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank menggunakan 5 Komponen COSO dalam ICoFR (*Internal Control over Financial Reporting*) yaitu penilaian sendiri (*self assessment*) terhadap 5 (lima) komponen pengendalian COSO (*Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission*) yaitu: (1) Lingkungan Pengendalian; (2) Penilaian Risiko; (3) Aktivitas Pengendalian; (4) Informasi dan Komunikasi; dan (5) Pemantauan.

Apresiasi dan Penutup

Direksi BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris atas bimbingan, arahan, dan pengawasan yang diberikan dalam menjalankan tugas operasional sehari-hari. Kami juga menyampaikan apresiasi kepada para pemegang saham dan nasabah atas kepercayaan yang telah diberikan, yang memungkinkan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk terus tumbuh secara signifikan dan berkelanjutan, serta mencatatkan kinerja operasional dan keuangan yang solid di tengah tantangan dan ketidakpastian. Kami juga berterima kasih kepada regulator serta seluruh pemangku kepentingan lainnya atas dukungan dan kerja sama yang terjalin dengan baik sepanjang 2025.

Tidak lupa, kami menyampaikan apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kerja kerasnya, yang memungkinkan BPR CHANDRA MUKTIARTHA untuk terus berkembang dan mewujudkan visi serta misi yang kita emban bersama. Kinerja baik pada tahun 2025 menjadi landasan bagi pencapaian yang semakin kokoh di tahun-tahun mendatang.

Akhir kata, kepada seluruh nasabah dan mitra kerja, merupakan suatu kebanggaan bagi kami, keluarga besar PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA, untuk senantiasa dapat melayani serta memenuhi harapan Anda. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berkomitmen untuk terus menyediakan produk dan layanan, baik dalam penghimpunan dana maupun penyaluran kredit, yang selaras dengan perkembangan skala usaha serta memenuhi pembiayaan untuk kebutuhan konsumtif nasabah.



2. Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris

Kepada Pemegang Saham serta Para Pemangku Kepentingan yang kami hargai,

Dengan memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Pengawasan atas pengelolaan Bank untuk tahun buku 2025. Di tengah kondisi ekonomi dan dunia usaha yang belum kondusif, BPR Chandra Muktiartha cukup mampu menjaga ketahanan kinerja dan stabilitas usaha melalui disiplin eksekusi strategi serta pengelolaan risiko yang prudent.

Laporan Dewan Komisaris mencakup penilaian atas kinerja Direksi dalam mengelola perusahaan serta pengawasan terhadap perumusan dan pelaksanaan strategi oleh Direksi; pandangan atas prospek usaha BPR Chandra Muktiartha; dan pengawasan penerapan tata kelola perusahaan serta kinerja struktur organ tata kelola.

Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan

Pada tahun buku 2025, Dewan Komisaris menjalankan tugas pengawasan terhadap Direksi, antara lain:

1. Memonitor pelaksanaan Rencana Bisnis Bank (RBB), menilai pencapaian kinerja keuangan serta operasional, dan memberikan arahan strategis guna pengembangan usaha
2. Pengawasan atas penerapan Tata Kelola (GCG) dilakukan dengan memastikan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran diterapkan, serta menilai sejauh mana fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko dilaksanakan secara efektif.
3. Menjalankan pengawasan atas pelaksanaan manajemen risiko, meliputi risiko kredit, operasional, likuiditas, dan kepatuhan, sekaligus menilai secara berkala laporan profil risiko BPR Chandra Muktiartha.
4. Pengawasan atas Sistem Pengendalian Internal meliputi pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan bank, menilai kelengkapan sistem pengendalian internal (*internal control*) serta memantau tindak lanjut temuan audit internal maupun eksternal sampai selesai secara menyeluruh
5. Menjamin kesesuaian dengan peraturan serta pelaksanaan kewajiban kepatuhan (*comply with*) pembuatan laporan memenuhi semua ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penyelesaian setiap komitmen yang diambil BPR bersama regulator.

Frekuensi serta Cara Rapat

Selama tahun buku 2025, Dewan Komisaris PT BPR Chandra Muktiartha secara rutin mengadakan rapat sebagai bagian dari fungsi pengawasan terhadap kebijakan dan proses pengurusan Perseroan.

Selama periode tersebut, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 5 **(lima) kali Rapat Dewan Komisaris**. Selain itu, dalam upaya memperkuat koordinasi dan sinergi dengan Direksi,



telah diadakan 4 (**empat**) kali **Rapat Gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi**.

Rapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan, dengan agenda yang meliputi evaluasi kinerja, pembahasan strategi bisnis, pengawasan penerapan tata kelola, serta pemantauan profil risiko Perseroan.

Dewan Komisaris menilai pelaksanaan rapat sepanjang tahun 2025 berlangsung cukup efektif, rapat dilaksanakan secara berkelanjutan, pembahasan agenda yang komprehensif dan relevan dengan kondisi Perseroan, pencapaian pengambilan keputusan tepat waktu dan berkualitas, serta tindak lanjut memadai atas setiap rekomendasi dan hasil rapat.

Dengan demikian, rapat Dewan Komisaris berfungsi secara efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas pengawasan serta memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik di lingkungan PT BPR Chandra Muktiartha.

Agenda rapat mencakup:

1. Menilai kembali performa keuangan serta operasional
2. Analisis dan evaluasi atas laporan audit dan kinerja BPR
3. Pengawasan risiko serta kepatuhan
4. Penyetujuan kebijakan strategis tertentu

Anggota Dewan Komisaris secara rata-rata hadir sepanjang 100% (seratus persen).

Saran kepada Direksi

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyampaikan berbagai saran kepada Direksi, di antaranya:

1. Peningkatan mutu kredit serta penurunan tingkat NPL
 2. Penguatan mekanisme pengendalian internal
 3. Pengembangan kualitas SDM dan peningkatan kompetensi
 4. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi
 5. Penguatan Manajemen Risiko dan Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi
- Direksi telah menindaklanjuti semua rekomendasi secara memadai.

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Tugas Direksi

Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab pengelolaan PT BPR Chandra Muktiartha dengan baik, serta menunjukkan komitmen tinggi dalam menindaklanjuti saran dan nasihat yang diberikan Dewan Komisaris. Upaya ini tercermin dalam kinerja perusahaan yang tetap terjaga dan menunjukkan perbaikan berkelanjutan sepanjang tahun 2025.

Dewan Komisaris mengapresiasi kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran Direksi dalam mempertahankan serta meningkatkan kinerja Bank secara optimal, meskipun kondisi perekonomian masih diwarnai ketidakpastian baik di tingkat nasional maupun regional.



Ke depan, Dewan Komisaris menekan Direksi agar terus menambah performa lewat penguatan strategi bisnis, penerapan manajemen risiko yang lebih efektif, serta pemanfaatan optimalisasi peluang pertumbuhan yang ada, untuk memastikan kelangsungan usaha PT BPR Chandra Muktiartha.

Penilaian serta Evaluasi Dewan Komisaris tentang Prospek Bisnis

Dewan Komisaris menilai prospek usaha BPR ke depan cukup menantang, mengingat kondisi ekonomi makro dan regional belum mengalami pertumbuhan signifikan. Fokus utama harus pada penjualan kredit berkualitas, peningkatan kolektibilitas kredit, pengembangan DPK, peningkatan kompetensi pegawai, serta penguatan permodalan secara organik.

Dewan Komisaris menyatakan dukungan terhadap prospek bisnis tahun 2026 yang disampaikan oleh Direksi, yang diakui mencerminkan pendekatan seimbang antara pengoptimalan peluang usaha dan penerapan mitigasi risiko yang memadai.

Dewan Komisaris turut mendukung kebijakan Direksi dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank (RBB) dengan memakai asumsi yang realistis dan terukur, sehingga sasaran yang ditetapkan dapat dicapai secara optimal sambil tetap memelihara prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris juga menekankan pentingnya bagi Direksi untuk terus memelihara kecukupan permodalan dan likuiditas sebagai landasan utama dalam menanggapi dinamika lingkungan usaha yang terus berubah, guna menjamin kelangsungan dan kesehatan operasional Bank secara berkelanjutan.

Pengawasan terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan

Salah satu tanggung jawab Dewan Komisaris, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR dan BPRS, adalah memastikan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik-transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran-dalam setiap aktivitas usaha BPR Chandra Muktiartha di semua tingkatan dan jenjang organisasi.

Bisnis perbankan didasari oleh kepercayaan (*trust*) nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik sangat penting untuk menjaga dan memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham, serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan penilaian internal terhadap 12 Faktor Tata Kelola pada posisi 31 Desember 2025, BPR Chandra Muktiartha memperoleh Peringkat Komposit 3 (Cukup Baik).

Pengawasan dan Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank

Berdasarkan POJK No. 15 Tahun 2024 tanggal 09 Oktober 2024 mengenai Integritas Pelaporan Keuangan Bank, Pasal 9 ayat (1) dan (3) menegaskan bahwa Dewan Komisaris BPR harus melakukan pengawasan terhadap penerapan kebijakan serta prosedur pengendalian internal



dalam proses pelaporan keuangan.

Berdasarkan pengawasan Dewan Komisaris atas penerapan Kebijakan dan Prosedur Pengendalian Internal dalam Proses Pelaporan Keuangan Bank Tahun 2025, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direksi telah menjalankan tugasnya dengan menyusun serta menyajikan Informasi Keuangan dan Laporan Keuangan yang mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku serta ketentuan OJK tentang pencatatan transaksi keuangan;
2. Mengacu pada Laporan Pengendalian Internal untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan (PIPKu) Bank tahun 2025 yang diterima oleh Dewan Komisaris, berisi hal: a) Hasil Penilaian Sendiri Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan (PIPKu) yang dilaksanakan oleh Direksi dengan Peringkat **2 (Cukup Memadai)** serta b) Laporan Hasil Pengujian atas Pos-Pos Laporan Keuangan Posisi 31 Desember 2025 yang telah disiapkan oleh Unit atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab atas pencegahan kecurangan atau manipulasi dalam Informasi Keuangan dan/ atau Laporan Keuangan Bank (hasil pengolahan data dan analisis dari SI-PIPKu),
3. BPR telah dilaporkan oleh Dewan Komisaris, yang menegaskan bahwa pengendalian internal berjalan efektif selama proses pelaporan Keuangan Bank pada tahun 2025;
4. Tidak ada tindakan yang disengaja dengan tujuan memperoleh keuntungan bagi diri sendiri atau pihak lain;
5. Tidak ada tekanan atau intervensi dari pihak manapun terhadap Bank yang menimbulkan kesalahan saji dalam Informasi Keuangan atau Laporan Keuangan Bank, maupun kelemahan signifikan dalam proses pelaporan keuangan Bank.

Pengawasan Implementasi Kepatuhan

Pelaksanaan fungsi kepatuhan Dewan Komisaris harus menjamin bahwa fungsi kepatuhan bank dilaksanakan sesuai Pasal 44 ayat (6) huruf a POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan pada BPR dan BPR Syariah dengan cara yang aktif, yakni:

1. Evaluasi rutin penerapan fungsi kepatuhan dilakukan, salah satunya melalui diskusi di rapat Dewan Komisaris;
2. memberikan saran dan arahan kepada Direksi guna meningkatkan mutu penerapan fungsi kepatuhan;
3. mendorong Direksi untuk menindaklanjuti hasil pengawasan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan serta memastikan pemenuhan komitmen kepada otoritas.

Pengawasan Pelaksanaan Program APU PPPT serta PPPSPM

Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) harus diimplementasikan saat berhubungan usaha dengan calon nasabah maupun pengguna jasa Bank (Nasabah atau Walk In Customer) sesuai pedoman Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 8 tahun 2023 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan



Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT, dan PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan yang berlaku sejak 14 Juni 2023.

Dewan Komisaris memastikan penerapan program APU PPT dan PPPSPM di BPR Chandra Muktiartha berjalan optimal dengan upaya pencegahan dan mitigasi risiko penyalahgunaan Bank oleh pelaku TPPU, TPPT, serta PPSPM untuk kegiatan kriminal secara langsung maupun tidak langsung. Dalam operasionalnya, Unit Kerja dan semua pegawai di BPR mengikuti Standar Operasional Prosedur APU PPT dan PPPSPM.

Pengawasan Pelaksanaan Strategi Anti Penipuan

Mengacu pada POJK No. 12 Tahun 2024 mengenai Penerapan Strategi *Anti Fraud* (SAF) Bagi Lembaga Jasa Keuangan, PT BPR Chandra Muktiartha sebagai Lembaga Jasa Keuangan (OJK) telah mengembangkan Standar Prosedur Operasional Penerapan Strategi Anti Fraud sesuai dengan POJK No. 12 Tahun 2024. SOP ini mencerminkan komitmen manajemen PT BPR Chandra Muktiartha untuk mencegah terjadinya *fraud* dengan menerapkan sistem pengendalian fraud yang dijalankan secara efektif dan berkelanjutan. Sistem pengendalian *fraud* ini membantu BPR Chandra Muktiartha dalam merumuskan langkah-langkah untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memantau kejadian *fraud*.

Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan keempat pilar strategi Anti Fraud *Anti Fraud*, yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, serta Sanksi, bersama dengan Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut, melalui Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud Semester I dan II Tahun 2025 yang mencakup *Self Assessment* terhadap keempat pilar tersebut yang dilaporkan setiap semester ke OJK dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Berdasarkan evaluasi laporan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan empat pilar Strategi Anti Fraud secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan memadai, namun masih dapat dioptimalkan lebih lanjut. *Anti Fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan.

Berkenaan dengan isu ini, Dewan Komisaris menyampaikan saran/ nasihat kepada Direksi untuk:

1. Seluruh Kepala Unit Kerja dimohon untuk terus menerapkan fungsi pengawasan/kontrol, mulai dari maker, checker hingga approval, dengan ketat dan penuh tanggung jawab guna memperkuat pengendalian internal. Hal ini penting agar BPR Chandra Muktiartha terhindar dari risiko fraud.
2. Sosialisasi serta peningkatan kesadaran risiko guna mencegah terjadinya potensi risiko Fraud menjadi fokus utama. BPR harus berkomitmen untuk melaksanakan sosialisasi atau kampanye kesadaran anti fraud, termasuk anti penyuapan dan anti korupsi, melalui penyelenggaraan pertemuan rutin internal minimal dua kali setahun.

Akhir Dewan Komisaris

Dewan Komisaris PT BPR Chandra Muktiartha mengungkapkan apresiasi tertinggi kepada Direksi serta seluruh karyawan atas kinerja, komitmen, dan dedikasi yang telah ditampilkan sepanjang tahun buku 2025.



Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah melaksanakan pengelolaan Perseroan dengan baik, tetap menegakkan prinsip kehati-hatian, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, serta mengelola risiko secara efektif dalam menghadapi dinamika industri perbankan.

Ke depan, Dewan Komisaris bertekad untuk terus memperkuat fungsi pengawasan secara independen dan objektif, memastikan setiap kebijakan serta strategi yang diimplementasikan Perseroan selaras dengan prinsip tata kelola yang baik dan mendukung pertumbuhan usaha yang sehat dan berkelanjutan.



II. Profil Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

1. Data Direksi dan Dewan Komisaris

1.	Nama	CICILIA WIWIK
	Alamat	MOJAYAN RT 002 RW 003 MOJAYAN KLATEN TENGAH JAWA TENGAH
	Jabatan	Direktur
	Tanggal Mulai Menjabat	30 Juni 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	30 Juni 2028
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	S-350/KO.134/2025
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	24 Juni 2025
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	31 Juli 2004
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS SANATA DHARMA YOGYAKARTA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	PEMBAHASAN KEBUJAKAN PEMBENTUKAN CKPN
	Tanggal Pelatihan	09 Januari 2025
	Lembaga Penyelenggara	PERBARINDO
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	06 Oktober 2027



2.	Nama	FX SOEWARDI WP
	Alamat	JL. TANGGUL MAS IV/47 RT 004 RW 009 PANGGUNG LOR SEMARANG UTARA SEMARANG JAWA TENGAH
	Jabatan	Komisaris Utama
	Tanggal Mulai Menjabat	09 Juli 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	09 Juli 2028
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	83
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	21 Agustus 2025
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	19 Oktober 2001
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSITAS TERBUKA JAKARTA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	PERAN STRATEGI DEKOM DALAM MENINGKATKAN KINERJA BP
	Tanggal Pelatihan	01 Agustus 2025
	Lembaga Penyelenggara	LPPM WIDYAPRATAMA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	21 November 2027



3.	Nama	CH BAGUS ANGGARA JITA
	Alamat	JL. EMPU BARADA NO. 31 RT 01 RW 05 SONGGOLANGIT GENTAN BAKI SUKOHARJO JAWA TENGAH
	Jabatan	Komisaris
	Tanggal Mulai Menjabat	09 Juli 2025
	Tanggal Selesai Menjabat	09 Juli 2028
	Nomor SK Persetujuan Otoritas	84
	Tanggal SK Persetujuan Otoritas	21 Agustus 2025
	Pendidikan Terakhir	S1
	Tanggal Kelulusan	29 Februari 1996
	Nama Lembaga Pendidikan	UNIVERSTIAS GAJAH MADA
	Pendidikan Non Formal Terakhir	LEADERSHIP JOURNEY DEVELOPMENT PROGRAM
	Tanggal Pelatihan	04 September 2019
	Lembaga Penyelenggara	DAYA DIMENSI INDONESIA
	Memiliki Sertifikat Kompetensi Kerja yang Berlaku	Ya
	Tanggal Berakhir Masa Berlakunya Sertifikat Kompetensi Kerja	02 April 2027



2. Data Pejabat Eksekutif

1.	Nama	ATIK WARSITARINI
	Alamat	KRUWET RT 1 RW 5 SUMBERAGUNG MOYUDAN SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	11 Juni 2018
	Surat Pengangkatan No.	180/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	09 Mei 2018
	2.	Nama
Alamat		SERUT RT01 RW25 MADUREJO PRAMBANAN SLEMAN
Jabatan		Pejabat Eksekutif Lainnya
Tanggal Mulai Menjabat		22 Juli 2024
Surat Pengangkatan No.		219/HR/LP/CMA/VII/2024
Surat Pengangkatan Tanggal		22 Juli 2024
3.		Nama
	Alamat	PERUM GRIYA MULIA ASRI SALAKAN RT007 POTORONO BANGUNTAPAN BANTUL
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko, Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	16 Mei 2024
	Surat Pengangkatan No.	028/CMA/OJK/V/2024
	Surat Pengangkatan Tanggal	16 Mei 2024
	4.	Nama
Alamat		KERGAN RT 002 RW 000 TIRTOMULYO KRETEK BANTUL YOGYAKARTA
Jabatan		Pejabat Eksekutif Lainnya
Tanggal Mulai Menjabat		03 Juni 2024
Surat Pengangkatan No.		315/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025
Surat Pengangkatan Tanggal		06 November 2025



5.	Nama	ANGGA NOVANDRIAN
	Alamat	JL AFFANDI GG KUWARA I NO 2 MRICAN RT 009 RW 004 CATURTUNGGAL CATURTUNGGAL SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	08 September 2018
	Surat Pengangkatan No.	180/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	22 Juli 2024
6.	Nama	SUKMA DEWA
	Alamat	PANJEN PUCANGANOM RT 007 RW 028 WEDOMARTANI NGEMPLAK SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Audit Intern
	Tanggal Mulai Menjabat	05 Agustus 2024
	Surat Pengangkatan No.	230/HR/SD-SKD/CMA/VII/20
	Surat Pengangkatan Tanggal	31 Juli 2024
7.	Nama	AGI FEBRIYANTO
	Alamat	BODEH RT 003 RW 024 AMBARKETAWANG GAMPING SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	18 November 2024
	Surat Pengangkatan No.	134/HR/SD-SKD/CMA/VII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	15 November 2024
8.	Nama	ROLIYATI PURWANINGRUM
	Alamat	ONGGOMERTAN NAYAN RT 7 RW 26 MAGUWOHARJO DEPOK SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	20 Januari 2025
	Surat Pengangkatan No.	021/HR/LP/CMA/I/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	20 Januari 2025



9.	Nama	MELLYANNA KURNIAWATI
	Alamat	KEMBARAN RT 007 TAMANTIRTO KASIHAN BANTUL YOGYAKARTA
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	08 Juli 2025
	Surat Pengangkatan No.	151/HR/SK-SKD/CMA/VII/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	07 Juli 2025
10.	Nama	ADJI HENDARTO
	Alamat	GONDANGAN PENEN RT 05 RW 028 SENDANGADI MLATI SLEMAN
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	06 November 2025
	Surat Pengangkatan No.	316/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	06 November 2025
11.	Nama	YENNY KUSUMANINGRUM
	Alamat	TEMPEL NGIPIK RT 003 BATURETNO BANGUNTAPAN BANTUL
	Jabatan	Pejabat Eksekutif Lainnya
	Tanggal Mulai Menjabat	06 November 2025
	Surat Pengangkatan No.	319/HR/STK-SPK/CMA/XI/2025
	Surat Pengangkatan Tanggal	06 November 2025



III. Kepemilikan

Daftar Kepemilikan

1.	Nama	AGUS PRAMONO
	Alamat	JL. TENTARA PELAJAR NO 12 TR 001 RW 007 TEMANGGUNG
	Jenis Pemilik	Perorangan
	Status Pemegang Saham	PSP
	Jumlah Nominal	Rp9133000000
	Persentase Kepemilikan	45.67%
	2.	Nama
Alamat		JL. TENTARA PELAJAR NO 12 RT 001 RW 007 TEMANGGUNG
Jenis Pemilik		Perorangan
Status Pemegang Saham		Non PSP
Jumlah Nominal		Rp6867000000
Persentase Kepemilikan		34.33%
3.		Nama
	Alamat	SEMARANG
	Jenis Pemilik	Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat
	Status Pemegang Saham	Non PSP
	Jumlah Nominal	Rp4000000000
	Persentase Kepemilikan	20.00%

Daftar Ultimate Shareholder

1.	Nama Ultimate Shareholder	AGUS PRAMONO
----	---------------------------	---------------------



IV. Perkembangan Usaha

1. Riwayat Pendirian BPR

Informasi Umum Pendirian BPR	
Nomor akta pendirian	73
Tanggal akta pendirian	13 April 1993
Tanggal mulai beroperasi	19 Juli 1993
Nomor perubahan anggaran dasar terakhir	38
Tanggal perubahan anggaran dasar terakhir	15 Januari 2026
Nomor pengesahan dari instansi yang berwenang	AHU-AH.01.09-0064111
Tanggal pengesahan dari instansi yang berwenang	18 Februari 2026
Bidang usaha sesuai anggaran dasar	PERBANKAN
Tempat kedudukan	BANTUL
Hasil Audit Akuntan Publik	
Opini Akuntan Publik	01. Wajar Tanpa Pengecualian
Nama Akuntan Publik	INDARTO WALUYO



2. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Nominal
Pendapatan Operasional	42.961.266
Beban Operasional	40.990.275
Pendapatan Non Operasional	77.481
Beban Non Operasional	60.975
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.987.497
Taksiran Pajak Penghasilan	350.000
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.637.497

3. Kualitas Aset Produktif dan Rasio Keuangan

Kualitas Aset Produktif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet	Jumlah
Surat Berharga	-	-	-	-	-	-
Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-
Penempatan pada Bank Lain	319.266.556	-	-	-	-	319.266.556
Kredit yang Diberikan	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263
a. Kepada BPR	-	-	-	-	-	-
b. Kepada Bank Umum	-	-	-	-	-	-
c. Kepada Nonbank - Pihak Terkait	-	-	-	-	-	-
d. Kepada Nonbank - Pihak Tidak Terkait	286.920.682	-	25.826.897	14.527.629	39.547.436	403.545.263



Jumlah Aset Produktif	893.107.919	-	51.653.794	29.055.259	79.094.871	1.126.357.081
------------------------------	--------------------	----------	-------------------	-------------------	-------------------	----------------------

Rasio Keuangan

Keterangan	Nilai Rasio
Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)	14,14
Rasio Cadangan terhadap PPKA	100
NPL Neto	34,63
NPL Gross	40,62
Return on Assets (ROA)	0,54
Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	95,41
Net Interest Margin (NIM)	3,60
Loan to Deposit Ratio (LDR)	85,01
Cash Ratio	8,61

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat total aset produktif sebesar Rp1,126 triliun, dengan penempatan pada bank lain sebesar Rp319,3 miliar dan kredit yang diberikan Rp403,5 miliar. Dari kredit tersebut, bagian lancar mencapai Rp286,9 miliar, sementara kredit kurang lancar, diragukan, dan macet masing-masing sebesar Rp25,8 miliar, Rp14,5 miliar, dan Rp39,5 miliar. Aset produktif lancar (termasuk penempatan pada bank lain) mencapai Rp893,1 miliar, sedangkan total aset kurang lancar, diragukan, dan macet masing-masing Rp51,7 miliar, Rp29,1 miliar, dan Rp79,1 miliar. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas aset tetap berada dalam kategori lancar, namun terdapat eksposur signifikan pada kredit bermasalah yang perlu dikelola secara hati-hati.

Rasio keuangan mengindikasikan KPMM sebesar 14,14 % dan cadangan penuh terhadap PPKA (100 %). NPL netto tercatat 34,63 % dan NPL gross 40,62 %, menandakan tingkat kredit bermasalah yang tinggi. ROA hanya 0,54 % sementara BOPO mencapai 95,41 %, mencerminkan profitabilitas yang masih terbatas. NIM berada pada 3,60 % dan LDR 85,01 %, menunjukkan margin bunga yang wajar dan penggunaan dana yang efisien. Cash Ratio sebesar 8,61 % menandakan likuiditas yang memadai untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

4. Penjelasan NPL

Penjelasan, Penyebab, dan Langkah Penyelesaian NPL

NPL Gross (%)	40,62
NPL Neto (%)	34,63

Penyebab Utama Kondisi NPL:



Dalam periode 1 (satu) tahun terakhir, peningkatan rasio Non-Performing Loan (NPL) pada BPR Chandra Muktiartha dipengaruhi oleh beberapa faktor utama yang berasal dari sisi debitur maupun kondisi eksternal.

Dari aspek pihak/debitur, NPL didominasi oleh debitur pada segmen usaha mikro dan kecil yang memiliki ketahanan usaha relatif terbatas terhadap perubahan kondisi ekonomi. Beberapa debitur mengalami penurunan kemampuan bayar akibat penurunan pendapatan dan arus kas usaha.

Berdasarkan sektor ekonomi, kredit bermasalah terutama berasal dari sektor perdagangan kecil, jasa, dan usaha konsumtif, yang sangat sensitif terhadap fluktuasi daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi lokal.

Ditinjau dari siklus usaha debitur, sebagian debitur berada pada fase penurunan usaha, khususnya akibat melemahnya permintaan pasar serta meningkatnya biaya operasional, yang berdampak pada terganggunya kemampuan pembayaran kewajiban kredit.

Dari sisi faktor internal bank, NPL dipengaruhi oleh masih perlunya penguatan pada proses analisis kredit, khususnya dalam penilaian kemampuan bayar debitur, monitoring pasca pencairan kredit, serta ketepatan dalam segmentasi dan mitigasi risiko kredit.

Sementara itu, dari sisi faktor eksternal, kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, dunia usaha yang masih mengalami penurunan penjualan, serta penurunan daya beli masyarakat turut memberikan dampak terhadap kinerja usaha debitur. Selain itu, faktor force majeure dan kondisi tertentu pada wilayah operasional juga berkontribusi terhadap peningkatan risiko kredit.

BPR Chandra Muktiartha secara berkelanjutan melakukan upaya mitigasi melalui penguatan manajemen risiko kredit, perbaikan proses end-to-end credit, serta peningkatan kualitas monitoring dan penagihan guna menekan rasio NPL ke depan.

Langkah Penyelesaian:

Angka pencapaian NPL Gross pada Desember 2025 sebesar 40,62%. Angka NPL ini sangat menantang dan upaya untuk menyelesaikan kredit bermasalah selama tahun 2025 masih belum maksimal dan optimal sehingga memerlukan tindakan perbaikan kolektibilitas dengan terlebih dahulu memetakan kemauan dan kemampuan bayar debitur yang menunggak untuk mengintensifkan penagihan, menjajaki penjualan agunan secara sukarela milik debitur yang bermasalah dan melakukan lelang jaminan.

5. Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan dan Perubahan Penting Lain

Perkembangan Usaha yang Berpengaruh secara Signifikan

Selama tahun 2025 terjadi pertumbuhan yang cukup signifikan terutama pada pertumbuhan tabungan yaitu sebesar 11.15%. Pendapatan operasional yang merupakan pendapatan bunga bersih ditambah pendapatan operasional lainnya turun sebesar -13.44% serta Beban operasional yang merupakan beban diluar beban bunga turun sebesar -13.59% juga pertumbuhan kredit turun sebesar -25.61%



V. Analisis dan Pembahasan Manajemen

1. Tinjauan Perekonomian

Tinjauan Perekonomian

Perekonomian Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif cukup stabil, meskipun dihadapkan pada dinamika ketidakpastian global yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga pada kisaran $\pm 5\%$, dengan realisasi tahun 2025 sekitar 5,1% dan proyeksi tahun 2026 berada pada rentang 4,9%–5,7%.

Dari sisi domestik, pertumbuhan ekonomi didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang tetap kuat. Peningkatan daya beli masyarakat, dukungan belanja pemerintah, serta berbagai program stimulus dan bantuan sosial turut memperkuat permintaan domestik sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Bagi industri perbankan, termasuk BPR Chandra Muktiartha, kondisi ini menciptakan peluang sekaligus tantangan. Di satu sisi, pertumbuhan kredit diproyeksikan meningkat pada kisaran 3%, sejalan dengan pemulihan sektor riil. Namun di sisi lain, kehati-hatian tetap diperlukan dalam pengelolaan risiko kredit, likuiditas, dan kualitas aset di tengah ketidakpastian global yang berimbas ke perekonomian nasional dan di tingkat regional.

Dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian tahun 2025, industri BPR diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyaluran kredit secara selektif dan produktif, memperkuat manajemen risiko, khususnya risiko kredit dan likuiditas, mengembangkan layanan berbasis digital untuk meningkatkan daya saing serta memperluas jangkauan wilayah pemasaran untuk pembiayaan pada sektor produktif dan UMKM.

Langkah-langkah tersebut penting diambil oleh BPR Chandra Muktiartha untuk meningkatkan penjualan kredit dan menjaga kualitas kredit serta memupuk DPK di tengah kondisi ekonomi yang belum pulih dalam rangka menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kontribusi BPR terhadap perekonomian daerah.

2. Strategi dan Kebijakan Manajemen

Strategi dan Kebijakan Dalam Pengembangan Usaha

Kinerja PT. BPR Chandra Muktiartha tahun 2025 merupakan hasil dari berbagai upaya perbaikan secara menyeluruh meliputi pelayanan, sistem kerja dan peningkatan pengetahuan Sumber Daya Manusia. Beberapa Strategi dan Kebijakan guna mewujudkan pengembangan usaha adalah sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan aktivitas operasional selalu berpedoman pada ketentuan perundang-undangan maupun ketentuan praktek terbaik dalam perbankan lainnya yang ditetapkan manajemen



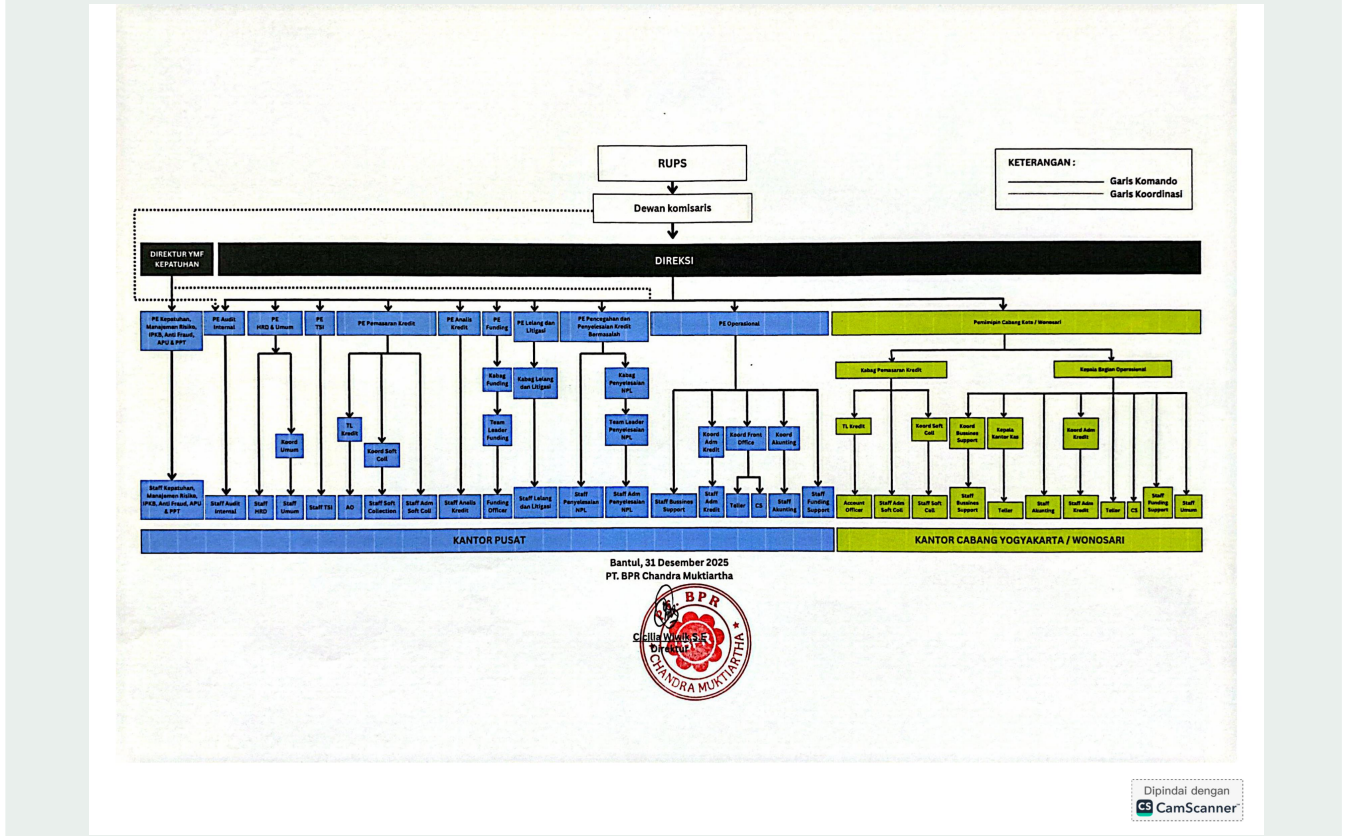
2. Meningkatkan integritas, kemampuan, pengetahuan, kedisiplinan, Jujur dan berdedikasi tinggi kepada perusahaan serta mentaati aturan dan kode etik perusahaan
3. Meningkatkan kinerja secara tim yang solid serta menciptakan hubungan kekeluargaan yang kuat pada seluruh karyawan
4. Terus melakukan pengembangan sistem dan aplikasi serta perangkat keras dalam upaya untuk mengikuti cepatnya perkembangan teknologi informasi.
5. Peningkatan efisiensi dalam segala aktifitas operasional dengan tidak mengurangi nilai nilai pelayanan kepada nasabah dan tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian
6. Mengupayakan secara konsisten peningkatan DPK (Dana Pihak Ketiga) khususnya dana Tabungan untuk menciptakan struktur pendanaan yang ideal dengan fokus pada dana murah (LCD - *Low Cost Deposit*) melalui strategi marketing dan membangun hubungan baik dengan nasabah serta akuisisi terhadap penabung-penabung baru melalui kerja sama dengan sekolah-sekolah untuk meningkatkan saldo tabungan.
7. Meningkatkan penjualan kredit kepada nasabah baru dan juga eksisting yang layak dengan *top up* kredit. Meminta *referral* dari nasabah debitur yang memiliki rekan bisnis yang membutuhkan bantuan modal kerja.

Strategi dan Kebijakan Dalam Manajemen Risiko

1. Memiliki kebijakan manajemen risiko yang menekankan pada pembentukan tata kelola manajemen risiko yang sehat dan menata penetapan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*). Limit risiko dievaluasi kembali sekali dalam 1 tahun atau lebih dalam hal terdapat perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan usaha BPR secara signifikan.
2. Strategi untuk memitigasi kredit perlu dibuat panduan dan peta portofolio (*portfolio guidance*) sektor ekonomi yang memiliki prospek yang bagus dan yang sedang mengalami penurunan.
3. Melakukan analisa risiko pada beberapa sektor usaha yang dibiayai dan mengalami penurunan kinerja sehingga dapat dilakukan tindakan-tindakan preventif untuk meminimalisir risiko yang mungkin terjadi.
4. Untuk mengelola risiko operasional perlu dilakukan kajian dan pemantauan secara berkala atas sistem dan prosedur di BPR untuk menjaga serta mendukung kesinambungan operasional usaha Bank.

3. Struktur Organisasi

Diagram / Gambar Struktur Organisasi



Penjelasan Struktur Organisasi

Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya telah mencerminkan penerapan Tata kelola yang baik antara lain:

1. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan menyediakan waktu yang cukup untuk optimalisasi tugasnya serta tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank kecuali hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan/ atau peraturan perundangan yang berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
2. Direksi bertanggung jawab atas setiap keputusan untuk pelaksanaan kepengurusan Perseroan serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya dalam RUPS.
3. Direksi melakukan pengelolaan Perseroan sesuai kewenangan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Undang-Undang yang berlaku.
4. Direksi tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
5. Direksi senantiasa menindaklanjuti temuan pemeriksaan dan rekomendasi dari audit intern maupun ekstern, hasil pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) dan/ atau hasil pengawasan otoritas lain.



6. Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap dan akurat kepada Komisaris secara tepat waktu.
7. Keputusan- keputusan strategis senantiasa diputuskan melalui rapat Direksi yang pengambilan keputusannya dilakukan secara musyawarah mufakat, dibuat risalah rapatnya dan didokumentasikan dengan baik, serta diimplementasikan sesuai kebijakan, pedoman dan tata tertib kerja yang berlaku. Keputusan diambil apabila seluruh Direksi yang hadir menyetujui .

4. Bidang Usaha

Bidang Usaha dan Produk BPR/BPRS		
1.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Tabungan
	Uraian	Tabungan
2.	Kategori Kegiatan Usaha	01. Penghimpunan Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Deposito
	Uraian	Deposito
3.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Modal Kerja
	Uraian	Kredit Modal Kerja
4.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Investasi
	Uraian	Kredit Investasi
5.	Kategori Kegiatan Usaha	02. Penyaluran Dana
	Jenis Produk	01. Produk dasar
	Nama Produk	Kredit Konsumsi
	Uraian	Kredit Konsumsi



5. Teknologi Informasi

Teknologi Informasi untuk Sistem Operasional

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting:

1. Sistem Operasional
 - a. Sistem operasional menggunakan Core Banking PT BPR Chandra Muktiartha bekerja sama dengan vendor PT. USSI Primasoftware
 - b. Sistem Pelaporan ke Otoritas Jasa Keuangan meliputi :
 - SiPeduli untuk pengaduan Nasabah, Self Assesment, edukasi dan Inklusi
 - SLIK untuk Sistem Informasi Layanan Keuangan
 - APOLO untuk pelaporan kepada OJK
 - Sigap untuk pelaporan APU PPT dan Judi Online
 - Aplikasi Sipesat Grips dan Sipendar untuk PPATK
 - c. Sharing bandwidth Perbarindo

Sistem Keamanan Teknologi Informasi

Dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada nasabah yang cepat, tepat dan akurat serta memenuhi kebutuhan informasi bagi manajemen, rencana pengembangan usaha serta informasi terkait dengan laporan kepada otoritas, kehandalan teknologi informasi menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Perkembangan dan Target Pasar

Guna mendukung rencana pengembangan usaha yang telah ditetapkan dalam Rencana Bisnis harus didukung adanya suatu target yang terukur dan target pasar yang jelas. Langkah-langkah untuk pengembangan target pasar dilakukan dengan cara:

1. Meningkatkan jumlah nasabah dari beberapa wilayah yang selama ini sudah menjadi pasar BPR.
2. Memperluas wilayah pemasaran baru disekitar wilayah yang sudah ada.
3. Target pengembangan usaha dengan mencari peluang sektor ekonomi potensial yang ada di wilayah kerja.

7. Jumlah, Jenis, dan Lokasi Kantor

Daftar Jaringan Kantor



1.	Nama Kantor	KANTOR PUSAT
	Alamat	JL.GEDONGKUNING NO.150A BANGUNTAPAN BANTUL YOGYAKARTA
	Desa/Kecamatan	BANGUNTAPAN
	Kabupaten/Kota	Kab. Bantul
	Kode Pos	55171
	Nama Pimpinan	CICILIA WIWIK
	Nomor Telepon	(0274)385 192
	Jumlah Kantor Kas	0
2.	Nama Kantor	KANTOR CABANG WONOSARI
	Alamat	JL. MGR SUGIYO PRANOTO NO.76, PURWOSARI, BALEHARJO
	Desa/Kecamatan	BALEHARJO
	Kabupaten/Kota	Kab. Gunung Kidul
	Kode Pos	55881
	Nama Pimpinan	ANGGA NOVANDRIAN
	Nomor Telepon	(0274)391 566
	Jumlah Kantor Kas	2
3.	Nama Kantor	KANTOR CABANG YOGYAKARTA
	Alamat	JL. LETJEN SUPRAPTO NO.48 NGAMPILAN YOGYAKARTA
	Desa/Kecamatan	NGAMPILAN
	Kabupaten/Kota	Kota Yogyakarta
	Kode Pos	55244
	Nama Pimpinan	ATIK WARSITA RINI
	Nomor Telepon	(0274)530 4727
	Jumlah Kantor Kas	0

8. Kerja Sama BPR dengan Bank atau Lembaga Lain

Kerja Sama BPR/BPRS dengan Bank atau Lembaga Lain



1.	Nama Lembaga Lain yang Bekerjasama	Kantor Hukum Berry and Partners
	Jenis Lembaga Lain yang Bekerjasama	2. Lembaga Lain
	Tanggal Kerja Sama	11 November 2024
	Jenis Kerja Sama	Penanganan kredit bermasalah PKS No. 006/SPK/BPRCMA/XI/2024
	Uraian Kerja Sama	PPenyelesaian kredit bermasalah dengan cara pelunasan kewajiban (tidak termasuk melalui AYDA)

9. Penanganan Pengaduan Nasabah

Strategi pemasaran yang efektif, *engagement* kepada nasabah perlu terus dijaga dan ditingkatkan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kepuasan nasabah (*customer satisfaction*) terhadap layanan yang diberikan, sehingga diharapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis.

PT BPR Chandra Muktiartha terus berupaya menjaga konsistensi layanan yang fokus pada pelanggan melalui standarisasi kualitas layanan di *front liner* termasuk pada layanan penanganan keluhan pelanggan (*complaint handling*) yang siap memberikan pelayanan bisnis maupun *support* bisnis bagi unit kerja hingga penyelesaian keluhan nasabah sesuai dengan ketentuan OJK yang diatur dalam POJK No. 22 Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Pengaduan nasabah akan diproses sebagaimana alur berikut:



Pada penyampaian hasil penyelesaian, nasabah dapat menyepakati ataupun tidak menyepakati hasil penyelesaian pengaduan sehingga di SOP Pelindungan Konsumen PT BPR Chandra Muktiartha diatur bahwa:

1. Jika sepakat, maka pengaduan dianggap selesai.
2. Apabila tidak sepakat, nasabah dapat mengajukan penyelesaian pengaduan melalui tahapan banding ke PT BPR Chandra Muktiartha.
3. Apabila nasabah tetap tidak dapat menerima hasil penyelesaian pengaduan setelah tahap banding, nasabah dapat mengajukan permohonan penyelesaian pengaduan di pengadilan atau luar pengadilan. Penyelesaian pengaduan di luar pengadilan dapat dilakukan melalui mediasi maupun arbitrase kepada Regulator, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK), atau lembaga lainnya.

Dalam penanganan pengaduan nasabah, PT BPR Chandra Muktiartha telah memiliki prosedur yang telah ditetapkan untuk memberikan solusi yang cepat, tepat, dan memuaskan bagi nasabah. Pada tahun 2025, terdapat 2 (dua) pengaduan nasabah.



Tabel Publikasi Penanganan Pengaduan Tahun 2025

No	Jenis Transaksi Keuangan	Selesai		Dalam Proses		Tidak Selesai		Jumlah Pengaduan
		Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	Jumlah	Pesentase	
1	Produk/Jasa Bank Lainnya	0	0	0	0	0	0.00%	0
2	Simpanan	0	0	0	0	0	0.00%	0
3	Kredit Tanpa Angunan	0	0	0	0	0	0.00%	0
4	Pinjaman (Modal Kerja, Investasi, Konsumer)	0	0	2	100	0	0.00%	2
Grand Total		0	0	100.00%	0	0.00%		2

10. Tingkat Kesehatan Bank

BPR Chandra Muktiartha secara rutin melakukan penilaian terhadap risiko dan kinerja Bank melalui pelaksanaan *self-assessment* Tingkat Kesehatan Bank (TKB) dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk-Based Bank Rating*) dan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.03/2022 tanggal 04 Maret 2025 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS.

Hasil akhir *self-assessment* TKB metode RGEC berupa Peringkat Komposit (PK), dengan cakupan penilaian terhadap faktor-faktor berikut:

1. Profil Risiko (*Risk Profile*)
2. Good Corporate Governance (GCG)
3. Rentabilitas (*Earnings*)
4. Permodalan (*Capital*)

Tabel Tingkat Kesehatan PT BPR Chandra Muktiartha (*Self Assessment*)

Faktor Penilaian	Penilaian Per Semester II 2025	Penilaian Per Semester II 2024
	Peringkat	Peringkat
Profil Risiko (<i>Risk Profile</i>)	3	3
Tata Kelola (<i>Good Corporate Governance</i>)	2	3
Rentabilitas (<i>Earnings</i>)	4	4
Permodalan (<i>Capital</i>)	4	3
Peringkat Tingkat Kesehatan Bank Berbasis Risiko	3	3

Peringkat Tingkat Kesehatan PT BPR Chandra Muktiartha dengan metode penilaian berbasis risiko (RBBR - *Risk Based Bank Rating*) berada pada Peringkat Komposit 3 (PK 3) – CUKUP SEHAT dengan rincian untuk masing-masing faktor penilaian yaitu Profil Risiko berada pada Peringkat 3 (Sedang), GCG berada pada Peringkat 2 (Baik), Rentabilitas berada pada Peringkat 4 (Kurang



Sehat) dan Permodalan berada pada Peringkat 4 (Kurang Sehat).

VI. Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Komposisi Sumber Daya Manusia

Statistik Komposisi Karyawan Per Kantor	
Jumlah Pegawai Pemasaran	47 orang
Jumlah Pegawai Pelayanan	12 orang
Jumlah Pegawai Lainnya	87 orang
Jumlah Pegawai Tetap	122 orang
Jumlah Pegawai Tidak Tetap	24 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S3	0 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S2	2 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan S1/D4	91 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan D3	22 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan SMA	26 orang
Jumlah Pegawai Pendidikan Lainnya	5 orang
Jumlah Pegawai Laki-laki	81 orang
Jumlah Pegawai Perempuan	65 orang
Jumlah Pegawai Usia <=25	10 orang
Jumlah Pegawai Usia >25-35	68 orang
Jumlah Pegawai Usia >35-45	57 orang
Jumlah Pegawai Usia >45-55	10 orang
Jumlah Pegawai Usia >55	1 orang



2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPR/BPRS

1.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penilaian dan Pelaporan Tingkat Kesehatan Bank, Profil Risiko dan Tata Kelola
	Tanggal Pelaksanaan	17 Januari 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dimaksudkan untuk membekali peserta dengan pemahaman menyeluruh mengenai komponen- komponen penilaian tingkat kesehatan bank, termasuk aspek risiko, permodalan, rentabilitas, likuiditas, dan tata kelola.
2.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SI PIPKu (Sistem Informasi Pengendalian Internal Pelaporan Keuangan) untuk Meningkatkan Integritas Pelaporan Keuangan BPR-BPRS sesuai POJK No 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank
	Tanggal Pelaksanaan	23 Januari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan bertujuan untuk membekali peserta dengan pemahaman teknis dan praktis dalam penggunaan SI PIPKu, sebuah aplikasi digital yang dirancang untuk memperkuat sistem pengendalian internal atas pelaporan keuangan di BPR dan BPRS.
3.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan How To Achieve Peak Performance In 2025
	Tanggal Pelaksanaan	17 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut bertujuan untuk membekali peserta dengan strategi praktis dalam mencapai performa kerja terbaik di tengah tantangan dan dinamika organisasi.
4.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi Pedoman Akuntansi BPR
	Tanggal Pelaksanaan	05 Februari 2025
	Jumlah Peserta	9 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Kegiatan sosialisasi dilaksanakan untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta mengenai ketentuan dan prinsip yang tertuang dalam pedoman akuntansi yang berlaku di BPR.
5.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Keterampilan Komunikasi dan Motivasi untuk Memulai 2025 dengan Penuh Semangat
	Tanggal Pelaksanaan	15 Januari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dirancang untuk membekali peserta dengan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan membangun motivasi kerja yang berkelanjutan.
6.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Proses Akuntansi Amortisasi Kredit di BPR Konvensional
	Tanggal Pelaksanaan	06 Februari 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh



		mengenai konsep amortisasi kredit dan penerapannya dalam pencatatan akuntansi.
7.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SI INSAF (Sistem Informasi Strategi Anti Fraud) APOLO untuk Meningkatkan Pengendalian Risiko Fraud pada BPR BPRS sesuai POJK No 12 Tahun 2024
	Tanggal Pelaksanaan	11 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan diselenggarakan untuk memberikan pembekalan teknis kepada peserta mengenai penggunaan aplikasi APOLO sebagai alat bantu dalam menyusun, melaporkan, dan memantau implementasi strategi anti fraud di BPR/ BPRS. Materi pelatihan mencakup pemahaman terhadap POJK No. 12 Tahun 2024, pengenalan fitur dan fungsi utama aplikasi APOLO, serta simulasi langsung penggunaan aplikasi untuk pelaporan dan monitoring strategi anti fraud.
8.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Tatap Muka Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) di BPR
	Tanggal Pelaksanaan	23 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai konsep, metodologi perhitungan, serta penerapan CKPN sesuai dengan ketentuan regulator dan standar akuntansi yang berlaku.
9.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Warrior Spirit Memimpin Tim Elit untuk Memenangkan Peperangan Bisnis Bersama Coach Humprey Rusli
	Tanggal Pelaksanaan	22 Februari 2025



	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut bertujuan untuk membangun karakter kepemimpinan tangguh dan adaptif dalam menghadapi tantangan dunia bisnis yang dinamis.
10.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penyusunan Rencana Audit Kredit Individual
	Tanggal Pelaksanaan	19 Februari 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan auditor dalam menyusun rencana audit kredit individual yang sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik dan berbasis risiko
11.	Nama Kegiatan Pengembangan	Sosialisasi POJK Nomor 1 Tahun 2024 dan Risiko Kredit
	Tanggal Pelaksanaan	14 Februari 2025
	Jumlah Peserta	19 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk menyamakan pemahaman seluruh peserta terhadap kebijakan regulator terbaru dan memperkuat penerapan manajemen risiko kredit secara efektif dan berkelanjutan di lingkungan BPR.
12.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Professional Service Excellence
	Tanggal Pelaksanaan	17 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Tujuan pelatihan tersebut adalah untuk membekali peserta dengan pengetahuan dan keterampilan praktis dalam memberikan pelayanan terbaik sesuai standar profesionalisme dan kebutuhan nasabah.
13.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1
	Tanggal Pelaksanaan	10 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan dan pemenuhan standar kompetensi bagi calon direksi BPR.
14.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur Tingkat 1
	Tanggal Pelaksanaan	10 Februari 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai bagian dari program pengembangan kepemimpinan dan pemenuhan standar kompetensi bagi calon direksi BPR.
15.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital SIPETA (Sistem Informasi Pelaporan Tahunan) untuk Menyusun dan Menyampaikan Laporan Tahunan BPR ke OJK One Click melalui APOLO dan Penyediaan Aplikasi Digital SIP-WEB (Sistem Informasi Pengelolaan Website) BPR
	Tanggal Pelaksanaan	21 Maret 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut meliputi alur input data, teknis unggah dokumen, serta pengelolaan konten informasi publik.
16.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Etika Bisnis Perbankan
	Tanggal Pelaksanaan	12 Maret 2025
	Jumlah Peserta	22 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai bagian dari upaya pembentukan integritas dan profesionalisme dalam dunia perbankan, khususnya di lingkungan BPR. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta mengenai prinsip-prinsip etika dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan, termasuk sikap profesional, tanggung jawab sosial, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
17.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Pengelolaan Off Balansheet sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan
	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan strategis dalam mengelola transaksi off-balance sheet (OBS) di lingkungan BPR.
18.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penggunaan IBS TKS System USSI
	Tanggal Pelaksanaan	15 Mei 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif



	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai bagian dari implementasi dan pemahaman teknis sistem informasi perbankan.
19.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Tindakan SK/PE Manajemen Risiko BPR Terhadap Pelaksanaan SAKEP CKPN Aktiva Produktif sesuai SEPOJK 21/2024, POJK 09/2024 dan POJK 13/2015 Direksi, PE-MR, Kepatuhan, Audit, dan Pejabat Lainnya
	Tanggal Pelaksanaan	09 Mei 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fungsi manajemen risiko dan kepatuhan dapat melaksanakan peran dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan terkini dari POJK.
20.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Analisa Kredit Tahap Dasar
	Tanggal Pelaksanaan	18 Juni 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan tersebut sebagai program pengembangan kompetensi dasar bagi analis kredit di lingkungan BPR.
21.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Remunerasi Pejabat dan Karyawan BPR/S
	Tanggal Pelaksanaan	13 Juni 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Kegiatan tersebut dirancang untuk membantu BPR/ S menciptakan kebijakan remunerasi yang mendukung produktivitas dan retensi SDM



22.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Kerja Direktur TK 2
	Tanggal Pelaksanaan	27 April 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan ini bertujuan untuk membekali calon direktur dengan pengetahuan dan keterampilan sesuai standar kompetensi jabatan, mencakup aspek tata kelola, manajemen risiko, kepatuhan, dan pengambilan keputusan strategis
23.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Break The Wall Bangun Komunikasi, Satukan Arah
	Tanggal Pelaksanaan	26 April 2025
	Jumlah Peserta	140 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Kegiatan ini dirancang untuk mendorong keterbukaan, membangun kepercayaan, serta menyelaraskan visi dan arah kerja seluruh pegawai. Pelatihan dilakukan secara interaktif dengan pendekatan partisipatif seperti diskusi kelompok, simulasi, dan sesi motivasi, guna menciptakan lingkungan kerja yang lebih solid dan produktif.
24.	Nama Kegiatan Pengembangan	Talkshow Forum Governance, Risk, And Compliance (GRC) Volume. 1 Penguatan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Implementasi GRC
	Tanggal Pelaksanaan	07 Juli 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait tata kelola yang baik bagi BPR dengan memperhatikan unsur



		Risiko, Kepatuhan dan Tata Kelola itu sendiri.
25.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Aplikasi Digital Sippatuh (Kepatuhan)
	Tanggal Pelaksanaan	11 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SE OJK No. 8/ SE.OJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR.
26.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Manajemen Kredit Bpr-s Di Tengah Pelemahan Dan Ketidakpastian Ekonomi Serta Regulasi Kualitas Kredit (Ckpn)
	Tanggal Pelaksanaan	15 Juli 2025
	Jumlah Peserta	32 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 1 tahun 2024 tentang Aset Produktif BPR.
27.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Manajemen Resiko Utk Modul 3 Dan 4
	Tanggal Pelaksanaan	20 Juli 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan sesuai dengan amanat POJK No. 13/ POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.
28.	Nama Kegiatan Pengembangan	Tugas dan Tanggung Jawab Kepala Cabang Merger di BPR (Hybrid)



	Tanggal Pelaksanaan	17 Juli 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Overview tugas dan tanggung jawab Kepala Cabang untuk pengelolaan dan pertumbuhan bisnis serta pengelolaan SDM.
29.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Proses Pengajuan Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif Spt Tahunan Badan Di System Coretax
	Tanggal Pelaksanaan	28 Juli 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Proses Pengajuan Penghapusan / Pengurangan Sanksi Administratif Spt Tahunan Badan Di System Coretax.
30.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Credit Intelligence Risk Management & Compliance Made Smarter (Manajemen Resiko & Kepatuhan Menjadi Lebih Cerdas)
	Tanggal Pelaksanaan	05 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	1 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan satuan kerja Manajemen Resiko & Kepatuhan.
31.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Standar Akuntansi Entitas Privat (Sak-ep) Di Semarang
	Tanggal Pelaksanaan	15 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemaparan terkait Standar Akuntansi Entitas Privat (Sak-ep) untuk menyusun laporan keuangan.
32.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Strategi Pengurusan Legalitas Bpr Paska Merger (Hybrid)
	Tanggal Pelaksanaan	22 Agustus 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pembahasan terkait Pengurusan Legalitas di BPR.
33.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Efektifitas Pelaksanaan Tugas Tanggungjawab&penyusunan Sop Serta Lap Fungsi Kepatuhan
	Tanggal Pelaksanaan	26 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Memberikan pemahaman mendalam kepada seluruh pejabat, pengurus dan pelaksana Fungsi Kepatuhan BPR agar mampu menjalankan fungsi kepatuhan sesuai dengan konsep dan prinsip fungsi kepatuhan dan regulasi yang berlaku (POJK No. 9 tahun 2024 tentang Tata Kelola bagi BPR dan BPRS dan SE OJK No. 8/ SE.OJK.03/2025 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan bagi BPR).
34.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Digital Sippena Versi.2 untuk Menyampaikan Lap Self Assesment Edukasi & Perlindungan Konsumen Th 2025 Ke Ojk Satu Klik Ke Sipeduli
	Tanggal Pelaksanaan	16 September 2025
	Jumlah Peserta	4 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR



	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Memahami langkah- langkah dalam menyusun laporan Self Assesment Edukasi & Perlindungan Konsumen Th 2025 Ke Ojk Satu Klik Ke Sipeduli.
35.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Manajemen Kepatuhan Yang Efektif, Kunci Sukses Organisasi
	Tanggal Pelaksanaan	04 September 2025
	Jumlah Peserta	20 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan terkait pemaparan Manajemen Kepatuhan Yang Efektif sebagai salah satu Kunci Sukses Organisasi.
36.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Meningkatkan Budaya Apu Ppt, Ppt, Pppspm Dan Anti Fraud
	Tanggal Pelaksanaan	20 September 2025
	Jumlah Peserta	158 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai
	Uraian Kegiatan	Kegiatan dilaksanakan sebagai wujud komitmen dalam membangun integritas, kepatuhan dan pencegahan risiko dalam aktivitas operasional perbankan dan sosialisasi POJK No 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program APU PPT dan PPPSPM.
37.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Penggunaan Core Tax System
	Tanggal Pelaksanaan	22 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait Penggunaan Core Tax System.
38.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Perlindungan Konsumen Dan



		Masyarakat Disektor Jasa Keuangan
	Tanggal Pelaksanaan	18 Oktober 2025
	Jumlah Peserta	30 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dan sosialisasi Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Disektor Jasa Keuangan sesuai regulasi yang ada (POJK No 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
39.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Membuat Rencana Bisnis
	Tanggal Pelaksanaan	04 November 2025
	Jumlah Peserta	25 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman dalam menyusun rencana bisnis BPR.
40.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Praktik Audit
	Tanggal Pelaksanaan	19 November 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait praktik audit.
41.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Pengikatan Kredit Dan Jaminan Untuk Janda/duda
	Tanggal Pelaksanaan	21 November 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait Pengikatan Kredit Dan Jaminan Untuk Janda/duda.



42.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Awareness Terhadap Tata Kelola Bpr Mengacu Pd Pojk 2025 Utk Kntor Pusat
	Tanggal Pelaksanaan	27 November 2025
	Jumlah Peserta	14 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait Awareness Terhadap Tata Kelola BPR mengacu pada POJK 9 tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola untuk BPR/S.
43.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Direksi & Komisaris Dalam Eksekusi Rbb
	Tanggal Pelaksanaan	08 Desember 2025
	Jumlah Peserta	3 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan terkait strategi dalam mewujudkan RBB.
44.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Siap Tks Bpr/bprs
	Tanggal Pelaksanaan	30 Desember 2025
	Jumlah Peserta	5 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pelatihan dilakukan untuk menyusun dan menyampaikan laporan Tingkat Kesehatan BPR ke OJK Satu Klik ke APOLO.
45.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Team Work Yang Berintegritas Dan Zero Fraud
	Tanggal Pelaksanaan	27 Desember 2025
	Jumlah Peserta	144 orang
	Pihak Pelaksana	01. Internal BPR
	Kategori Peserta	01. Seluruh Pegawai



	Uraian Kegiatan	Kegiatan work shop dan pelatihan untuk mewujudkan zero fraud dan meningkatkan integritas karyawan.
46.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Resiko Kredit Umkm Bagi Bpr
	Tanggal Pelaksanaan	12 November 2025
	Jumlah Peserta	20 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemaparan terkait Resiko Kredit UMKM Bagi BPR
47.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Fundamental Sdm It
	Tanggal Pelaksanaan	25 November 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman untuk Fundamental SDM IT.
48.	Nama Kegiatan Pengembangan	Pelatihan Kekuatan Hukum Buku Paksa Objek Ayda
	Tanggal Pelaksanaan	05 Desember 2025
	Jumlah Peserta	2 orang
	Pihak Pelaksana	02. Eksternal BPR
	Kategori Peserta	03. Pejabat Eksekutif
	Uraian Kegiatan	Pemahaman terkait kekuatan hukum untuk buka paksa objek AYDA.



VII. Laporan Keuangan Tahunan

1. Laporan Posisi Keuangan

Laporan Posisi Keuangan

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Kas dalam Rupiah	650.804	816.382
Kas dalam Valuta Asing	0	0
Surat Berharga	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Surat Berharga	0	0
Penempatan pada Bank Lain	58.569.599	47.152.013
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penempatan pada Bank Lain	84.861	123.512
Kredit yang Diberikan (Baki Debet)	250.915.633	333.530.804
Provisi yang belum diamortisasi	893.838	1.196.272
Biaya Transaksi Belum diamortisasi	74.480	186.518
Pendapatan Bunga yang Ditangguhkan dalam rangka restrukturisasi	2.232.289	2.838.938
Cadangan Kerugian Restrukturisasi	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Kredit yang Diberikan	9.419.825	13.700.848
Penyertaan Modal	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Penyertaan Modal	0	0
Agunan yang diambil alih	21.925.550	12.425.315
Properti Terbengkalai	0	0
Aset Tetap dan Inventaris	6.446.846	6.297.660
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	4.252.936	3.905.457
Aset Tidak Berwujud	756.400	746.400
Akumulasi Amortisasi dan Penurunan Nilai Aset Tidak Berwujud	261.076	166.839
Aset Antarkantor	0	0
Aset Keuangan Lainnya	0	0
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan Lainnya	0	0
Aset Lainnya	6.782.988	7.827.478



TOTAL ASET	328.977.476	387.050.704
Liabilitas Segera	943.831	933.332
Tabungan	37.811.803	34.017.323
Biaya Transaksi Tabungan Belum Diamortisasi	0	0
Deposito	254.039.166	317.190.710
Biaya Transaksi Deposito Belum Diamortisasi	0	0
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Pinjaman yang Diterima	0	0
Biaya Transaksi Belum Diamortisasi	0	0
Diskonto Belum Diamortisasi	0	0
Dana Setoran Modal-Kewajiban	0	0
Liabilitas Antarkantor	0	0
Liabilitas Lainnya	1.158.252	1.554.101
TOTAL LIABILITAS	293.953.052	353.695.467
Modal Dasar	50.000.000	50.000.000
Modal yang Belum Disetor -/-	30.000.000	30.000.000
Tambahan Modal Disetor	0	0
Agio	0	0
Modal Sumbangan	0	0
Dana Setoran Modal - Ekuitas	0	0
Tambahan Modal Disetor Lainnya	0	0
Keuntungan (Kerugian) dari Perubahan Nilai Aset Keuangan dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
Ekuitas Lainnya	0	0
Pajak Penghasilan terkait dengan Ekuitas Lain	0	0
Cadangan	0	0
Umum	4.000.000	4.000.000
Tujuan	0	0
Laba (Rugi)	0	0
Laba (Rugi) Tahun-Tahun Lalu	9.386.927	7.711.192
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.637.497	1.644.046
TOTAL EKUITAS	35.024.424	33.355.238

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat total aset sebesar Rp328,98 miliar pada 2025, turun



dari Rp387,05 miliar pada 2024, dipengaruhi penurunan kredit yang diberikan dari Rp333,53 miliar menjadi Rp250,92 miliar serta penurunan cadangan kerugian penurunan nilai kredit menjadi Rp9,42 miliar dari Rp13,70 miliar. Penempatan pada bank lain meningkat menjadi Rp58,57 miliar dibandingkan Rp47,15 miliar tahun sebelumnya, sementara agunan yang diambil alih naik signifikan menjadi Rp21,93 miliar dari Rp12,43 miliar. Kas dalam rupiah tetap rendah di kisaran Rp0,65 miliar, dan aset tidak berwujud serta aset tetap bersih tetap stabil di sekitar Rp0,76 miliar dan Rp2,19 miliar masing-masing setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Aset lainnya menurun menjadi Rp6,78 miliar dari Rp7,83 miliar, menandakan restrukturisasi portofolio non-kredit.

Total liabilitas pada 2025 tercatat Rp293,95 miliar, lebih rendah dibandingkan Rp353,70 miliar pada 2024, didorong oleh penurunan deposito yang turun menjadi Rp254,04 miliar dari Rp317,19 miliar serta tabungan yang naik menjadi Rp37,81 miliar. Liabilitas lainnya juga berkurang menjadi Rp1,16 miliar dari Rp1,55 miliar, sementara liabilitas segera tetap stabil di sekitar Rp0,94 miliar. Ekuitas meningkat menjadi Rp35,02 miliar pada 2025, naik dari Rp33,36 miliar tahun sebelumnya, didukung oleh laba tahun berjalan sebesar Rp1,64 miliar dan akumulasi laba tahun lalu sebesar Rp9,39 miliar. Dengan profitabilitas yang konsisten dan penurunan risiko kredit, PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berada pada posisi keuangan yang lebih kuat untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan.

2. Laporan Laba Rugi

Laporan Laba Rugi

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Pendapatan Operasional	42.961.266	49.597.775
1. Pendapatan Bunga		
a. Bunga Kontraktual		
Surat Berharga	0	0
Giro	490.369	825.225
Tabungan	7	45
Deposito	1.859.498	1.385.886
Sertifikat Deposito	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0
KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	33.172.772	40.523.378
b. Provisi Kredit		
Kredit Kepada Bank Lain	0	0
Kredit Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	1.256.662	2.331.682
c. Biaya Transaksi -/-		
Surat Berharga	0	0
KYD Kepada Bank Lain	0	0



KYD Kepada Pihak Ketiga bukan Bank	141.100	130.879
d. Koreksi Atas Pendapatan Bunga -/-		63.606
2. Pendapatan Lainnya		
a. Pendapatan Jasa Transaksi	0	597.619
b. Keuntungan Penjualan Valuta Asing	0	0
c. Keuntungan Penjualan Surat Berharga	0	0
d. Penerimaan Kredit yang Dihapusbuku	23.689	1.200
e. Pemulihan CKPN	4.475.234	1.619.719
f. Dividen	0	0
g. Keuntungan dari penyertaan dengan equity method	0	0
h. Keuntungan penjualan AYDA	0	0
i. Pendapatan Ganti Rugi Asuransi	0	0
j. Pemulihan penurunan nilai AYDA	0	0
k. Lainnya	1.824.135	2.507.505
Beban Operasional	40.990.275	47.438.311
1. Beban Bunga		
a. Beban Bunga Kontraktual		
Tabungan	756.086	1.099.473
Deposito	19.588.230	21.711.979
Simpanan dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Indonesia	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Bank Lain	0	0
Pinjaman yang Diterima Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
Pinjaman yang Diterima Berupa Pinjaman Subordinasi	0	0
Beban Bunga Lainnya	708.701	762.036
b. Biaya Transaksi		
Kepada Bank Lain	0	0
Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	0
2. Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit	0	0
3. Beban Kerugian Penurunan Nilai		
a. Surat Berharga	0	0
b. Penempatan pada Bank Lain	155.560	114.693
c. KYD Kepada Bank Lain	0	0



d. KYD Kepada Pihak Ketiga Bukan Bank	0	3.373.470
e. Penyertaan Modal	0	0
f. Aset Keuangan Lainnya	0	0
4. Beban Pemasaran	685.746	611.744
5. Beban Penelitian dan Pengembangan	0	0
6. Beban Administrasi dan Umum		
a. Beban Tenaga Kerja		
Gaji dan Upah	8.666.705	9.641.283
Honorarium	0	0
Lainnya	4.066.657	4.718.088
b. Beban Pendidikan dan Pelatihan	340.293	458.048
c. Beban Sewa		
Gedung Kantor	530.101	491.233
Lainnya	540.835	551.227
d. Beban Penyusutan/Penghapusan atas Aset Tetap dan Inventaris	347.479	359.198
e. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	94.237	65.797
f. Beban Premi Asuransi	479.194	11.660
g. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	172.042	173.841
h. Beban Barang dan Jasa	3.515.281	2.987.894
i. Beban Penyelenggaraan Teknologi Informasi	0	0
j. Kerugian terkait risiko operasional		
Kecurangan internal	0	0
Kejahatan eksternal	0	0
k. Pajak-pajak	8.983	41.036
7. Beban lainnya		
a. Kerugian Penjualan Valuta Asing	0	0
b. Kerugian Penjualan Surat Berharga	0	0
c. Kerugian dari penyertaan dengan equity method	0	0
d. Kerugian penjualan AYDA	0	0
e. Kerugian penurunan nilai AYDA	0	0
f. Lainnya	334.146	265.611
Laba (Rugi) Operasional	1.970.991	2.159.464
Pendapatan Non Operasional	77.481	133.902
1. Keuntungan Penjualan Aset Tetap dan Inventaris	0	0



2. Pemulihan Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	0
3. Pemulihan Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	77.481	133.902
Beban Non Operasional	60.975	176.676
1. Kerugian Penjualan/Kehilangan Aset Tetap dan Inventaris	0	0
2. Kerugian Penurunan Nilai Aset Tetap dan Inventaris	0	60.600
3. Kerugian Penurunan Nilai Lainnya	0	0
4. Bunga Antar Kantor	0	0
5. Selisih Kurs	0	0
6. Lainnya	60.975	116.076
Laba (Rugi) Non Operasional	16.506	-42.774
Laba (Rugi) Tahun Berjalan Sebelum Pajak	1.987.497	2.116.690
Taksiran Pajak Penghasilan	350.000	472.644
Pendapatan Pajak Tangguhan	0	0
Beban Pajak Tangguhan	0	0
Jumlah Laba (Rugi) Tahun Berjalan	1.637.497	1.644.046
Penghasilan Komprehensif Lain		
1. Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
a. Keuntungan Revaluasi Aset Tetap	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
2. Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi		
a. Keuntungan (Kerugian) dan Perubahan Nilai Aset Keuangan Dalam Kelompok Tersedia untuk Dijual	0	0
b. Lainnya	0	0
c. Pajak Penghasilan terkait	0	0
Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak	0	0
Total Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan		

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat penurunan pendapatan operasional menjadi Rp42,96 ratusan miliar pada 2025 dibandingkan Rp49,60 ratusan miliar pada 2024. Penurunan utama berasal dari penurunan KYD kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp33,17 ratusan miliar dan penurunan kredit kepada pihak ketiga bukan bank sebesar Rp1,26 ratusan miliar. Di sisi lain, beban operasional juga menurun menjadi Rp40,99 ratusan miliar dari Rp47,44 ratusan



miliar, didorong oleh penurunan beban bunga deposito dan beban tenaga kerja. Akibatnya, laba operasional tetap positif sebesar Rp1,97 puluhan miliar.

Pendapatan non operasional menurun menjadi Rp77,48 juta, sementara beban non operasional turun menjadi Rp60,98 juta, menghasilkan laba non operasional positif Rp16,51 juta. Setelah memperhitungkan taksiran pajak penghasilan sebesar Rp350 juta, laba bersih tahun berjalan tercatat Rp1,64 puluhan miliar.

3. Laporan Komitmen dan Kontijensi

Laporan Rekening Administratif

Dalam Ribuan Rupiah

Keterangan	Posisi 2025	Posisi 2024
Tagihan Komitmen		
Fasilitas Pinjaman yang Diterima yang Belum Ditarik	0	0
Tagihan Komitmen Lainnya	0	0
Kewajiban Komitmen		
Fasilitas Kredit kepada Nasabah yang Belum Ditarik	0	0
Penerusan Kredit (Channeling)	0	0
Kewajiban Komitmen Lainnya	0	0
Tagihan Kontinjensi		
a. Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian		
1) Bunga Kredit yang Diberikan	27.810.469	23.856.911
2) Bunga Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Surat Berharga	0	0
4) Lainnya	0	0
b. Aset Produktif yang dihapusbuku		
1) Kredit yang Diberikan	8.764.306	8.787.995
2) Penempatan pada Bank Lain	0	0
3) Pendapatan Bunga Atas Kredit yang dihapusbuku	1.828.874	1.831.570
4) Pendapatan Bunga Atas Penempatan Dana pada Bank Lain yang dihapusbuku	0	0
c. Agunan dalam Proses Penyelesaian Kredit	0	0
d. Tagihan Kontinjensi Lainnya	4.462.650	126.000
Kewajiban Kontinjensi	0	0
Rekening Administratif Lainnya	0	0

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat peningkatan signifikan pada pendapatan bunga kredit, yaitu dari Rp23.856.910.968 pada 2024 menjadi Rp27.810.469.016 pada 2025. Kenaikan



sebesar hampir Rp3,9 miliar mencerminkan pertumbuhan portofolio kredit yang lebih produktif. Aset produktif yang dihapusbuku mengalami penurunan marginal, dari Rp8.787.995.051 menjadi Rp8.764.305.880. Pendapatan bunga atas aset yang dihapusbuku tetap stabil di sekitar Rp1,83 miliar, menunjukkan pengelolaan risiko yang konsisten.

Pada sisi kewajiban kontinjensi, tagihan kontinjensi lainnya meningkat tajam dari Rp126.000.000 menjadi Rp4.462.650.235. Lonjakan ini menandakan adanya peningkatan eksposur terhadap penyelesaian kredit bermasalah. Semua pos lain dalam rekening administratif tetap nol, menegaskan bahwa tidak ada kewajiban komitmen atau fasilitas yang belum ditarik. Dengan demikian, PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA berada pada posisi keuangan yang kuat meskipun menghadapi peningkatan kontinjensi yang perlu dipantau secara ketat.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam Jutaan Rupiah

Keterangan	Modal Disetor
Saldo per 31 Des Tahun 2023	20.000
Dividen	0
Pembentukan Cadangan	0
DSM Ekuitas	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0
Revaluasi Aset 2025etap	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0
Saldo per 31 Des Tahun 2024	20.000
Dividen	0
Pembentukan Cadangan	0
DSM Ekuitas	0
Laba/Rugi yang Belum Direalisasi	0
Revaluasi Aset 2025etap	0
Laba/Rugi Periode Berjalan	0
Pos Penambah/Pengurang Lainnya	0
Saldo Akhir (per 31 Des)	20.000

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas

Dalam Ribuan Rupiah



Keterangan	Saldo 2025	Saldo 2024
Penerimaan pendapatan bunga	32.708.560	42.766.223
Penerimaan pendapatan provisi dan jasa transaksi	1.115.562	2.200.803
Penerimaan beban klaim asuransi	0	0
Penerimaan atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan	0	0
Pendapatan operasional lainnya	6.323.059	4.128.424
Pembayaran beban bunga	19.601.149	23.573.488
Beban gaji dan tunjangan	12.733.362	14.359.371
Beban umum dan administrasi	6.237.486	5.342.849
Beban operasional lainnya	297.146	236.537
Pendapatan non operasional lainnya	2.734.773	3.118.586
Beban non operasional lainnya	2.718.267	3.161.361
Pembayaran pajak penghasilan	0	0
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	0	0
Penempatan pada bank lain	58.569.599	47.152.013
Kredit yang diberikan	247.863.986	329.682.112
Agunan yang diambil alih	21.925.550	12.425.315
Aset lain-lain	6.782.988	7.859.167
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	0	0
Liabilitas segera	943.831	933.332
Tabungan	37.811.803	34.017.323
Deposito	254.039.166	317.190.710
Simpanan dari bank lain	0	0
Pinjaman yang diterima	0	0
Liabilitas imbalan kerja	0	0
Liabilitas lain-lain	1.059.702	1.444.901
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas operasi	713.465.989	849.592.516
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	2.193.910	2.392.203
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	495.324	579.561
Pembelian/penjualan Surat Berharga	0	0
Pembelian/penjualan Penyertaan Modal	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Investasi	2.689.234	2.971.764



Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal pelengkap	0	0
Penerimaan/pembayaran pinjaman yang diterima sebagai modal inti tambahan	0	0
Pembayaran dividen	0	0
Penyesuaian lainnya	0	0
Arus Kas neto dari aktivitas Pendanaan	0	0
Peningkatan (Penurunan) Arus Kas	716.155.223	852.564.280
Kas dan setara Kas awal periode	0	0
Kas dan setara Kas akhir periode	716.155.223	852.564.280

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat penurunan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp713,5 miliar pada 2025 dibandingkan Rp849,6 miliar pada 2024. Penurunan ini dipengaruhi oleh penurunan penerimaan pendapatan bunga menjadi Rp32,7 miliar dari Rp42,8 miliar serta penurunan pendapatan provisi menjadi Rp1,1 miliar dari Rp2,2 miliar, sementara pendapatan operasional lainnya meningkat menjadi Rp6,3 miliar. Beban bunga juga menurun menjadi Rp19,6 miliar dari Rp23,6 miliar, namun beban gaji dan tunjangan serta beban umum dan administrasi tetap tinggi masing-masing Rp12,7 miliar dan Rp6,2 miliar. PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA mencatat arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp2,7 miliar pada 2025, sedikit lebih rendah dibandingkan Rp3,0 miliar pada 2024, didominasi oleh pembelian aset tetap dan inventaris sebesar Rp2,2 miliar.

Tidak ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan selama kedua tahun, sehingga total peningkatan (penurunan) arus kas bersih berakhir pada Rp716,2 miliar pada 2025, turun dari Rp852,6 miliar pada 2024. Kas dan setara kas akhir periode mencerminkan penurunan tersebut, yaitu Rp716,2 miliar pada 2025 dibandingkan Rp852,6 miliar pada 2024. Di sisi aset, kredit yang diberikan menurun menjadi Rp247,9 miliar dari Rp329,7 miliar, sementara deposito berkurang menjadi Rp254,0 miliar dari Rp317,2 miliar. Tabungan tetap tumbuh menjadi Rp37,8 miliar, dan agunan yang diambil alih meningkat menjadi Rp21,9 miliar, menunjukkan pergeseran struktur likuiditas dan jaminan.



VIII. Laporan dan Opini Akuntan Publik

Ringkasan Opini Akuntan Publik

Laporan Tahunan kami sampaikan sesuai dengan data hasil pemeriksaan Auditor Independen Akuntan Publik Indarto dan Yudhika Nomor. 00098A/2.1358/ AU.8/07/0906-3/1/ IV/2026 yang diterbitkan tanggal 02 April 2026 dengan opini Laporan Keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT BPR Chandra Muktiartha untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.



**Surat Pernyataan Direksi
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Cicilia Wiwik
Alamat Kantor : Jl. Gedong Kuning 150A Banguntapan Bantul
Alamat Domisili : Mojayan RT. 002 RW. 003 Klaten Tengah Klaten Jawa Tengah
Nomor Telepon : 0274 385192
Jabatan : Direktur

Menyatakan bahwa:

1. Laporan Keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah disusun untuk laporan keuangan posisi tanggal 31 Desember 2025 dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku,
2. Semua informasi dalam laporan keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi tanggal 31 Desember 2025 telah dimuat secara lengkap dan benar,
3. Bertanggung jawab atas penerapan pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA posisi tanggal 31 Desember 2025 sesuai POJK mengenai integritas pelaporan keuangan Bank,
4. Hasil Penilaian terhadap efektifitas pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan BPR sesuai dengan dokumen Penilaian Sendiri Pengendalian Internal dalam Pelaporan Keuangan Bank (terlampir).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 23 April 2026

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA



Cicilia Wiwik

Direktur



Lembar Pernyataan
Direksi dan Anggota Dewan Komisaris
Tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan
Posisi Tanggal 31 Desember 2025
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Keuangan Posisi Tanggal 31 Desember 2025 PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA telah ditinjau dan dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Bantul, 23 April 2026
PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

FX Soewardi WP
Komisaris Utama

CH Bagus Anggara Jita
Komisaris



Cicilia Wiwik
Direktur



**PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025**

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Jl. Gedongkuning No. 150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta

Telp : (0274) 376276, Fax : (0274)385192, Hp: 082288435000

email: bprcma@bprcma.co.id | website: www.bprcma.co.id

**PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN KEUANGAN
DAN
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
31 DESEMBER 2025**

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

31 Desember 2025

DAFTAR ISI

	Halaman
▪ Surat Pernyataan Direksi	
▪ Laporan Auditor Independen	
▪ Laporan Posisi Keuangan	1
▪ Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya	2
▪ Laporan Perubahan Ekuitas	3
▪ Laporan Arus Kas	4
▪ Catatan Atas Laporan Keuangan	
▪ Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	5 - 23
▪ Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Keuangan	24 - 37
▪ Gambaran Umum Perusahaan	38 - 40
▪ Lampiran	

SURAT PERNYATAAN DIREKSI



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ny. Cicilia Wiwik
Jabatan : Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
Alamat Kantor : Jl. Gedongkuning No 150A, Banguntapan, Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia,
(0274) 376276 / 385192

Untuk dan atas nama PT BPR Chandra Muktiartha menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha;
2. Laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha tanggal 31 Desember 2025 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut telah disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha telah dimuat secara lengkap dan benar.
b. Laporan keuangan PT BPR Chandra Muktiartha tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
c. Semua dokumen transaksi, catatan keuangan dan pembukuan serta dokumen pendukung telah lengkap disusun dan disimpan oleh PT BPR Chandra Muktiartha sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal, pencegahan, dan penanggulangan kecurangan, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan yang relevan bagi PT BPR Chandra Muktiartha.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 02 April 2026



Ny. Cicilia Wiwik, S.E

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

PT. BPR CHANDRA MUKTIARTHA

Jl. Gedong Kuning No.150A Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
Telp. (0274) 376276, Fax : (0274) 385192, HP : 082288435000
email: bprcma@bprcma.co.id | website: www.bprcma.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan No: 00098/2.1358/AU.8/07/0906-3/1/IV/2026

Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi

PT. BPR Chandra Muktiartha

Opini

Kami telah mengaudit Laporan Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha ("Perusahaan"), yang terdiri dari Laporan Posisi Keuangan tanggal 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, Laporan Keuangan menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha terlampir untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2025, Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Laporan Arus Kas untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Penekanan Atas Suatu Hal

Kami menarik perhatian pada Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan bahwa pelaksanaan CKPN diatur berdasarkan surat keputusan Direksi No. 10/SK/CMA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan

Kantor : Jl. Tegalsari Raya No: 14, Jomblangan, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta 55198

Telp/Fax: (0274) 2841679, Email: kap.iy.pst@gmail.com; kap.iy.ind@gmail.com; kap.iy.yud@gmail.com



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

KAP Indarto dan Yudhika
Managing Partner

Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
NRAP. AP.0906
Yogyakarta, 02 April 2026: ATH



LAPORAN KEUANGAN

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA

LAPORAN POSISI KEUANGAN

31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

ASET	Catatan	2025	2024	2024
		Sesuai SAK EP	Restatement Sesuai SAK EP	Sesuai SAK ETAP
Kas	C.1	650.803.500	816.381.950	816.381.950
Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima				3.362.476.947
Penempatan Pada Bank Lain	C.2	58.569.599.072	47.152.012.879	47.152.012.879
PPKA				(123.512.497)
CKPN Penempatan Pada Bank L	C.2	(84.861.078)	(123.512.497)	
Kredit Yang Diberikan	C.3	247.863.986.403	329.682.111.883	333.530.803.590
Provisi				(1.196.271.786)
Biaya Transaksi				186.517.855
Pendapatan Bunga Yang Ditangguhkan				(2.838.937.776)
PPKA				(13.700.847.547)
CKPN Kredit	C.3	(9.419.824.564)	(13.700.847.547)	
Agunan Yang Diambil Alih	C.4	21.925.550.004	12.425.315.455	12.425.315.455
Aset tetap	C.5	6.446.846.131	6.297.660.131	6.297.660.131
Akum Peny. Aset tetap	C.5	(4.252.936.193)	(3.905.457.301)	(3.905.457.301)
Total		2.193.909.939	2.392.202.830	2.392.202.830
Aset Tidak Berwujud	C.6	756.400.000	746.400.000	746.400.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	C.6	(261.076.052)	(166.838.554)	(166.838.554)
Total		495.323.948	579.561.446	579.561.446
Aset Lain-Lain	C.7	6.782.988.346	7.859.166.857	4.496.689.910
Jumlah Aset		328.977.475.569	387.082.393.257	387.082.393.257
LIABILITAS				
Liabilitas Segera	C.8	943.830.664	933.332.452	933.332.452
Utang Bunga				972.256.822
Utang Pajak				472.644.182
Simpanan	C.9			
Tabungan		37.811.803.260	34.017.322.941	34.017.322.941
Deposito		254.039.165.981	317.190.710.159	317.190.710.159
Liabilitas Imbalan Kerja	C.10	98.550.000	109.200.000	109.200.000
Liabilitas Lainnya	C.11	1.059.701.947	1.444.901.004	
Jumlah Liabilitas		293.953.051.852	353.695.466.556	353.695.466.556
EKUITAS				
Modal		50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal Belum Disetor		(30.000.000.000)	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Modal Disetor	C.12	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
Saldo Laba	C.13			
Cadangan Umum		4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
Belum Ditentukan Tujuannya				
Laba Tahun Lalu		9.386.926.701	7.711.192.391	7.711.192.391
Laba Tahun Berjalan		1.637.497.017	1.675.734.310	1.675.734.310
Jumlah Saldo Laba		15.024.423.717	13.386.926.701	13.386.926.701
Jumlah Ekuitas		35.024.423.717	33.386.926.701	33.386.926.701
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas		328.977.475.569	387.082.393.257	387.082.393.257

Yogyakarta, 02 April 2026

Ny. Cicilia Wiwik, S.E

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2025	2024	2024
		Sesuai SAK EP	Restatement Sesuai SAK EP	Sesuai SAK ETAP
Pendapatan dan Beban Operasional				
Pendapatan Operasional				
Pendapatan Bunga Kontraktual	C.14	35.522.645.529	43.300.235.973	42.766.223.050
Pendapatan Bunga Tangguhan				597.619.174
Koreksi atas Pendapatan Bunga				(63.606.251)
Provisi	C.14	1.030.473.138	1.245.552.351	1.245.552.351
Administrasi dan Komisi	C.14	226.188.435	1.086.129.505	1.086.129.505
Biaya Transaksi	C.14	(141.099.680)	(130.878.633)	(130.878.633)
Jumlah Pendapatan Bunga - Bersih		36.638.207.421	45.501.039.196	45.501.039.196
Pendapatan Operasional Lainnya	C.15	6.323.058.550	4.128.424.095	4.128.424.095
Jumlah Pendapatan Operasional		42.961.265.971	49.629.463.291	49.629.463.291
Beban Operasional				
Beban Bunga	C.16	21.053.016.370	23.573.487.968	23.573.487.968
Beban Penyisihan Kerugian				3.488.162.875
Beban Kerugian Penurunan Nilai	C.17	155.559.848	3.488.162.875	
Beban Pemasaran	C.18	685.746.177	611.743.544	611.743.544
Beban Administrasi dan Umum	C.19	18.761.806.854	19.518.014.740	19.518.014.740
Beban Operasional Lainnya	C.20	334.146.059	246.901.426	246.901.426
Jumlah Beban Operasional		40.990.275.307	47.438.310.554	47.438.310.554
Laba (rugi) Operasional		1.970.990.664	2.191.152.738	2.191.152.738
Pendapatan dan Beban Non Operasional				
Pendapatan Non-Operasional	C.21	77.481.453	133.902.036	133.902.036
Beban Non-Operasional	C.22	(60.975.100)	(176.676.281)	(176.676.281)
Jumlah Pendapatan (Beban) Non-Operasional		16.506.353	(42.774.245)	(42.774.245)
Laba (rugi) Bersih Sebelum Pajak		1.987.497.017	2.148.378.492	2.148.378.492
Taksiran Pajak Penghasilan	C.23	(350.000.000)	(472.644.182)	(472.644.182)
Laba (Rugi) Bersih setelah Pajak		1.637.497.017	1.675.734.310	1.675.734.310

Yogyakarta, 02 April 2026



Ny. Cicilia Wiwik, S.E

Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

URAIAN	MODAL	SALDO LABA			JUMLAH
	MODAL DISETOR	CADANGAN TUJUAN	CADANGAN UMUM	BELUM DITENTUKAN TUJUANNYA	
Saldo Per 31 Desember 2023	20.000.000.000	-	4.000.000.000	7.711.192.392	31.711.192.392
Laba bersih tahun berjalan				1.675.734.310	1.675.734.310
Pembulatan				(1)	(1)
Saldo Per 31 Desember 2024	20.000.000.000	-	4.000.000.000	9.386.926.701	33.386.926.701
Laba bersih tahun berjalan				1.637.497.017	1.637.497.017
Pembulatan				1	1
Saldo Per 31 Desember 2025	20.000.000.000	-	4.000.000.000	11.024.423.717	35.024.423.717

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun Yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2025	2024
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASIONAL		
Penerimaan pendapatan bunga	35.522.645.529	43.300.235.973
Penerimaan pendapatan provisi	1.030.473.138	1.245.552.351
Penerimaan pendapatan administrasi dan transaksi	85.088.755	955.250.873
Pendapatan operasional lainnya	6.323.058.550	4.128.424.095
Pembayaran beban bunga	(21.053.016.370)	(23.573.487.968)
Beban gaji dan tunjangan	(12.733.361.990)	(14.359.371.168)
Beban umum dan administrasi	(6.272.474.652)	(5.345.392.016)
Beban operasional lainnya	(334.146.059)	(246.901.426)
Pendapatan non operasional lainnya	77.481.453	133.902.036
Beban non operasional lainnya	(60.975.100)	(176.676.281)
Pembayaran pajak penghasilan	(350.000.000)	(472.644.182)
Dividen	-	-
Penyesuaian lainnya atas pendapatan dan beban	(597.276.237)	(3.913.157.975)
Penurunan/Peningkatan atas aset operasional		
Penempatan pada bank lain	(11.417.586.193)	6.395.528.516
Kredit yang diberikan	81.818.125.481	15.604.462.784
Agunan yang diambil alih	(9.500.234.550)	(11.790.654.799)
Aset lain-lain	(149.690.830)	(280.965.374)
Penyesuaian lainnya atas aset operasional	(2.652.088.671)	2.459.957.410
Kenaikan/Peningkatan atas liabilitas operasional		
Liabilitas segera	10.498.212	(406.471.259)
Tabungan	3.794.480.319	(9.086.682.381)
Deposito	(63.151.544.178)	(4.271.821.254)
Simpanan dari bank lain		
Pinjaman yang diterima		
Liabilitas imbalan kerja	(10.650.000)	46.000.000
Liabilitas lain-lain	(385.199.057)	(416.999.803)
Penyesuaian lainnya atas liabilitas operasional		
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasional	(6.392.451)	(71.911.850)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pembelian/penjualan aset tetap dan inventaris	(149.186.000)	292.899.300
Pembelian/penjualan aset tidak berwujud	(10.000.000)	(303.900.000)
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi	(159.186.000)	(11.000.700)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penyesuaian Lainnya	0,60	
CKPN		
Penyesuaian SAK EP		
Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	0,60	-
KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS	(165.578.450)	(82.912.550)
KAS PADA AWAL TAHUN	816.381.950	899.294.500
KAS PADA AKHIR TAHUN	650.803.500	816.381.950

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

A. PERNYATAAN KEPATUHAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Manajemen PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA menyatakan bahwa laporan keuangan tahun 2025 dengan informasi komparatif pendekatan angka koresponding 2024 Audited disajikan berdasarkan:

1 SAK EP (Entitas Privat);

Laporan keuangan BPR disusun sesuai dengan SAK EP. Sedangkan PA BPR merupakan petunjuk teknis bagi BPR dalam menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK yang efektif saat ini. PA BPR bukan merupakan pengganti SAK EP sebagai dasar penyusunan laporan keuangan BPR. PA BPR tersebut sesuai dengan SE OJK No. 21/SEOJK.03/2024 Tentang Panduan Akuntansi Perbankan BPR.

2 Ketentuan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;

3 Ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan laporan keuangan BPR; dan

4 Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum dan standar akuntansi keuangan selain SAK EP.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI

1 Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

2 Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan disusun dalam Bahasa Indonesia.

3 Tanggung jawab atas laporan keuangan

Direksi BPR bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

4 Mata uang pelaporan

a. Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Apabila transaksi BPR menggunakan mata uang selain dari rupiah, maka laporan tersebut harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, yaitu kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan. Dalam hal kurs mata uang asing tidak tersedia di Bank Indonesia, BPR menggunakan kurs sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

b. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

c. Transaksi dalam mata uang asing harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

5 Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

BPR menyusun laporan keuangan menggunakan dasar akuntansi akrual, kecuali untuk informasi arus kas. Dalam dasar akrual, BPR mengakui aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan atau beban ketika definisi dan kriteria pengakuan terpenuhi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.36).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan

a. Aset

Aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh BPR sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan sumber manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan diterima BPR. (Hal ini mengacu pada SAK EP lampiran B).

Adapun pos-pos yang merupakan aset keuangan seperti surat berharga, penempatan pada bank lain, kredit, dan penyertaan modal disertai dengan pos pengurang berupa CKPN.

BPR menghitung Penyisihan Penghapusan Kualitas Aset (PPKA) sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) mengenai kualitas aset BPR. Apabila nilai PPKA lebih besar dari CKPN yang dibentuk BPR sesuai dengan SAK EP, maka selisih nilai PPKA dengan CKPN menjadi faktor pengurang dalam perhitungan modal inti BPR.

BPR mengakui aset dalam laporan posisi keuangan ketika kemungkinan besar manfaat ekonomik masa depan akan mengalir ke BPR dan nilai aset dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.37).

1). Kas

Kas adalah mata uang kertas atau logam dalam rupiah yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Dalam pengertian kas termasuk kas besar, kas kecil, kas dalam mesin anjungan tunai mandiri (ATM), dan kas dalam perjalanan. Tidak termasuk dalam pengertian kas adalah emas batangan, uang logam yang diterbitkan untuk memperingati peristiwa nasional (*commemorative coins/notes*), dan mata uang emas.

2). Kas dalam valuta asing

Kas dalam valuta asing adalah uang kertas asing (*banknotes*) dan *traveller's cheque* yang masih berlaku yang dimiliki BPR dalam kegiatan penukaran sebagai pedagang valuta asing sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. SAK EP Bab 30 tentang Penjabaran Valuta Asing. BPR dapat memiliki kas dalam valuta asing hanya dalam rangka melakukan kegiatan usaha sebagai pedagang valuta asing yang telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Mata uang asing diakui sebesar kurs transaksi (*spot rate*) yang berlaku pada tanggal perolehan/transaksi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 30.7). Pada setiap tanggal pelaporan BPR menjabarkan kas dalam valas ke rupiah dengan kurs penutup. Kurs penutup yang dirujuk adalah kurs transaksi Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal pelaporan dengan menggunakan kurs tengah yaitu kurs transaksi jual ditambah kurs transaksi beli mata uang asing Bank Indonesia dibagi dua. Kas dalam valuta asing disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar nilai nominal.

3). Surat Berharga

Surat Berharga adalah surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, Pemerintah Pusat Republik Indonesia, dan/atau Pemerintah Daerah. Surat berharga diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi. Contoh biaya transaksi yaitu *brokerage fee*. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Surat berharga disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi.

4). Penempatan Pada Bank lain

Penempatan pada bank lain adalah penempatan/tagihan atau simpanan milik BPR pada bank lain baik konvensional maupun syariah dengan maksud untuk menunjang kelancaran aktivitas operasional, dalam rangka memperoleh penghasilan, dan sebagai *secondary reserve*. Cakupan penempatan pada bank lain adalah penempatan dana BPR pada bank lain dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan penempatan dana lainnya yang sejenis. Nilai tercatat penempatan pada bank lain tidak boleh dikompensasi dengan nilai tercatat liabilitas pada bank lain, meskipun terhadap bank yang sama.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a. Aset (*Lanjutan*)

4). Penempatan Pada Bank lain (*Lanjutan*)

- Giro merupakan simpanan BPR pada bank umum yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, kartu ATM (kartu debit), sarana perintah pembayaran lain atau dengan cara pemindahbukuan.
- Tabungan merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lain yang dapat dipersamakan dengan itu.
- Deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dan BPR lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara BPR dan bank yang bersangkutan. Deposito terdiri dari deposito yang berjangka waktu dan deposit on call. Deposit on call merupakan deposito yang berjangka waktu relatif singkat dan dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pemberitahuan sebelumnya.
- Sertifikat deposito merupakan simpanan BPR pada bank umum dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan (atas unjuk). Bunga sertifikat deposito dihitung dengan cara diskonto, yaitu selisih antara nominal deposito dengan jumlah uang yang disetor.
- Penempatan pada bank syariah merupakan penempatan dana BPR pada bank umum syariah, unit usaha syariah bank umum dan BPR syariah dengan menggunakan akad syariah. Perlakuan akuntansi merujuk kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Syariah.

Giro, deposito, dan tabungan pada bank lain pada umumnya dicatat sebesar biaya perolehan, kecuali untuk produk sertifikat deposito dengan diskonto. Pengukuran selanjutnya, diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Nilai tercatat penempatan pada bank lain adalah nilai penempatan pada bank lain neto pada tanggal pelaporan setelah dikurangi CKPN. CKPN penempatan pada bank lain disajikan sebagai pengurang (*offsetting account*) dari penempatan tersebut.

5). Kredit yang Diberikan

Kredit adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga termasuk pengalihan piutang.

Kredit yang diberikan diukur pada biaya perolehan ditambah/dikurangi biaya transaksi termasuk provisi. Pendapatan bunga diukur dengan suku bunga efektif. Pengukuran selanjutnya diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk atas penurunan nilai instrumen keuangan sesuai standar akuntansi keuangan.

Pada saat penandatanganan perjanjian Kredit dengan debitur, BPR mengakui sebagai "kewajiban komitmen fasilitas Kredit yang diberikan kepada debitur" sebesar Plafon Kredit yang diperjanjikan atau yang dapat ditarik sesuai jadwal penarikan/penggunaan Kredit yang disepakati BPR dengan debitur, kecuali untuk penerusan Kredit. Jumlah kewajiban komitmen fasilitas Kredit tersebut dapat berkurang atau bertambah selama jangka waktu Kredit sesuai jenis Kreditnya,

Kredit disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar biaya perolehan diamortisasi. Kredit sindikasi disajikan berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR, termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud. Kredit kelolaan disajikan pada pos "Kredit yang Diberikan" berdasarkan porsi Kredit yang risikonya ditanggung BPR termasuk biaya transaksi yang terkait dengan porsi Kredit dimaksud.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a. Aset (*Lanjutan*)

5). Kredit yang Diberikan (*Lanjutan*)

Pendapatan bunga dari Kredit (yang diperhitungkan dalam estimasi arus kas masa datang pada saat pengakuan awal Kredit atau pada saat penyesuaian suku bunga Kredit) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya, disajikan sebagai tagihan bunga Kredit atau pendapatan bunga Kredit yang akan diterima.

Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

Selisih kurang antara perubahan estimasi arus kas atas Restrukturisasi Kredit dibandingkan dengan nilai tercatat diperhitungkan sebagai kerugian kredit.

Kredit restrukturisasi disajikan menjadi bagian dari Kredit.

Penghapusbukuan Kredit (hapus buku) adalah tindakan administratif BPR untuk memindahkan nilai yang dilaporkan pada laporan posisi keuangan tanpa mengurangi hak tagih BPR kepada debitur secara kontrak. Pada saat kredit dihapus buku, BPR telah membentuk CKPN sebesar 100%.

Penghapusbukuan dilakukan secara keseluruhan terhadap nilai tercatat Kredit dengan menjurnal balik CKPN – Kredit yang diberikan. Kredit yang dihapus buku disajikan dalam Rekening Administratif. Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku diakui sebagai Pendapatan Hapus Buku (Pendapatan Operasional Lainnya).

6). Penyertaan Modal

Penyertaan Modal adalah penanaman dana BPR dalam bentuk saham pada lembaga penunjang BPR dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini sesuai dengan SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar dan SAK EP Bab 14 tentang Investasi pada Entitas Asosiasi.

BPR mencatat seluruh investasi pada entitas asosiasi menggunakan salah satu metode yaitu metode biaya atau metode ekuitas.

Penghasilan dividen dari investasi pada entitas asosiasi diakui pada saat hak grup untuk menerima pembayaran telah ditetapkan. Penghasilan dividen termasuk dalam penghasilan lain.

BPR mengklasifikasikan investasi pada entitas asosiasi sebagai aset tidak lancar. (Hal ini mengacu SAK EP paragraf 14.11)

7). Agunan Yang Diambil Alih

Agunan yang Diambil Alih selanjutnya disingkat AYDA adalah aset yang diperoleh BPR baik sebagian atau seluruhnya dengan cara pembelian melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan, dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban kepada BPR dengan ketentuan agunan yang dibeli untuk dicairkan secepatnya. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR)

Biaya untuk menjual adalah biaya tambahan yang secara langsung dapat diatribusikan kepada pelepasan aset atau kelompok lepasan. Nilai Wajar adalah suatu jumlah dimana aset dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan, antara pihak yang paham dan berkeinginan dalam suatu transaksi yang wajar. Nilai Tercatat adalah nilai yang disajikan dalam laporan posisi keuangan setelah dikurangi cadangan rugi penurunan nilai.

AYDA yang dicatat dalam laporan posisi keuangan hanya yang berasal dari penyelesaian kredit melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. BPR memperhitungkan AYDA yang tercatat pada laporan posisi keuangan sebagai faktor pengurang modal inti BPR dalam perhitungan KPMM sesuai dengan POJK mengenai kualitas aset BPR.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a. Aset (*Lanjutan*)

7). Agunan Yang Diambil Alih (*Lanjutan*)

Pada saat pengakuan awal, AYDA dibukukan pada nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual yaitu maksimum sebesar kewajiban debitur. BPR tidak boleh mengakui keuntungan pada saat pengambilalihan aset.

Setelah pengakuan awal, AYDA dibukukan sebesar nilai yang lebih rendah antara nilai tercatat dengan nilai wajarnya setelah dikurangi biaya untuk menjual.

Apabila AYDA mengalami penurunan nilai, maka BPR mengakui rugi penurunan nilai tersebut.

Apabila AYDA mengalami pemulihan penurunan nilai, maka BPR mengakui pemulihan penurunan nilai tersebut maksimum sebesar rugi penurunan nilai yang telah diakui.

AYDA tidak dilakukan depresiasi.

Pada saat penjualan, selisih antara nilai tercatat AYDA dan hasil penjualannya diakui sebagai keuntungan atau kerugian operasional.

Hasil penjualan agunan yang dikuasai diakui sebagai pengurang tagihan yang terkait dengan kredit.

Biaya transaksi dalam proses pengurusan AYDA dapat dikapitalisasi sepanjang nilai AYDA lebih besar dibandingkan nilai tercatat kredit setelah ditambah kapitalisasi biaya transaksi.

AYDA disajikan dalam pos tersendiri dalam laporan posisi keuangan sebesar mana yang lebih rendah, antara: nilai tercatat kredit; atau nilai wajar setelah dikurangi estimasi biaya untuk menjual.

8). Aset Tetap

Aset tetap dan inventaris adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diperkirakan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 17.2). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 17 tentang Aset Tetap, SAK EP Bab 20 tentang Sewa dan SAK EP Bab 27 tentang Penurunan Nilai Aset.

Aset tetap dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sesuai PMK No. 72 Tahun 2023.

Penyusutan dimulai ketika suatu aset tetap tersedia untuk digunakan dan penyusutannya dihentikan ketika aset tetap dan inventaris dihentikan pengakuannya.

9). Properti Terbengkalai

Properti Terbengkalai adalah aset tetap dalam bentuk properti yang dimiliki BPR namun tidak digunakan untuk kegiatan usaha BPR yang berkaitan operasional BPR. (sesuai POJK mengenai kualitas aset BPR). Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 16 tentang Properti Investasi.

10). Aset Tak Berwujud

Aset Takberwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 18.2).

Bab ini hanya diterapkan untuk akuntansi seluruh aset takberwujud selain goodwill.

Pengakuan awal aset takberwujud diakui sebesar biaya perolehan.

BPR mengukur aset takberwujud pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai.

Aset takberwujud diamortisasi secara sistematis selama umur manfaatnya dan diakui sebagai beban setiap periode.

Penurunan nilai aset takberwujud diakui sebagai kerugian periode terjadinya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a. Aset (*Lanjutan*)

11). Aset lainnya

Aset Lainnya adalah pos-pos aset yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam kelompok pos aset yang ada dan tidak secara material untuk disajikan tersendiri.

Komponen aset lainnya, antara lain:

Pajak dibayar dimuka, biaya dibayar dimuka, Mata uang kertas dan logam yang ditarik, Piutang dari perusahaan asuransi, Aset Pajak Tangguhan, Aset Keuangan Lainnya, Pendapatan Bunga Yang Akan Diterima, Lainnya. Aset lainnya disajikan secara gabungan, kecuali komponennya memiliki nilai yang material, maka komponen tersebut disajikan tersendiri dalam laporan posisi keuangan.

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)

Penurunan nilai adalah suatu kondisi dimana terdapat bukti objektif terjadinya peristiwa yang merugikan sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal kredit tersebut, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal. Dasar pengaturannya ada pada SAK EP Bab 11 tentang Instrumen Keuangan Dasar.

CKPN adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Pada setiap akhir periode pelaporan, BPR menilai apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan atau biaya perolehan diamortisasi. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR langsung mengakui kerugian penurunan nilai dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.21).

Alur pembentukan CKPN sebagai berikut:

Langkah Pertama: Penilaian Pemenuhan Kriteria Aset Baik

- BPR melakukan penilaian apakah aset keuangan memenuhi kriteria aset baik. Kriteria aset baik sebagai berikut:

aset keuangan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia; aset keuangan dijamin oleh LPS; dan/atau aset keuangan tidak memiliki tunggakan lebih dari 7 (tujuh) hari dan tidak pernah dilakukan restrukturisasi. Dalam hal BPR melakukan perpanjangan kredit tanpa melihat kemampuan membayar debitur, hal tersebut dapat menjadi indikasi bahwa kredit dimaksud tidak tergolong aset baik.

- Apabila aset keuangan memenuhi kriteria aset baik, BPR dapat tidak membentuk CKPN atas aset keuangan tersebut; aset keuangan tidak memenuhi kriteria aset baik, BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan (Langkah Kedua).

Langkah Kedua: Penilaian Signifikansi

- BPR melakukan penilaian signifikansi aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik. Apabila aset keuangan signifikan, BPR melakukan penilaian terhadap aset keuangan tersebut secara individual (langkah ketiga); aset keuangan tidak signifikan, BPR membentuk CKPN secara kolektif.

Langkah Ketiga: Penilaian Individu Bukti Objektif Penurunan Nilai

- BPR melakukan penilaian secara individual terhadap aset keuangan yang tidak memenuhi kriteria aset baik dan signifikan. Penilaian dilakukan dengan menganalisis apakah terdapat bukti objektif penurunan nilai atas aset keuangan. Apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN individual; tidak terdapat bukti objektif penurunan nilai, BPR membentuk CKPN kolektif.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

a. Aset (*Lanjutan*)

12). Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) (*Lanjutan*)

Periode evaluasi penurunan nilai, bahwa setiap akhir bulan atau paling lambat setiap akhir triwulan, BPR mengevaluasi apakah terdapat bukti objektif bahwa kredit atau kelompok kredit mengalami penurunan nilai. Dalam hal BPR melakukan evaluasi setiap akhir triwulan, namun terdapat bukti objektif terjadinya penurunan nilai sebelum tanggal evaluasi berikutnya, maka BPR mengestimasi kembali arus kas masa datang dan CKPN untuk kredit tersebut.

Dalam hal terdapat kondisi sebagai berikut, bahwa BPR melakukan konsolidasi dengan kepemilikan yang sama; BPR melakukan akuisisi dan/atau penggabungan usaha; dan/atau BPR mengganti aplikasi inti perbankan atau sistem pencatatan transaksi, yang menyebabkan BPR belum dapat menyediakan data untuk perhitungan CKPN kolektif maka pembentukan CKPN kolektif dapat menggunakan *peer group* data sampai dengan BPR memiliki data historis untuk perhitungan CKPN kolektif minimal 2 (dua) tahun periode bisnis normal.

Formulasi CKPN= PD x LGD x EAD

- Probability of Default (PD)

Merupakan tingkat kemungkinan kegagalan Debitur dalam memenuhi kewajibannya yang dapat diukur dengan pendekatan yaitu antara lain *Migration Analysis*.

- Loss Given Default (LGD)

Merupakan besarnya tingkat kerugian yang diakibatkan kegagalan debitur memenuhi kewajiban, yang diukur berdasarkan pendekatan *Collateral Shortfall*.

- Exposure at Default (EAD)

Merupakan estimasi besarnya eksposur kredit pada saat terjadi wanprestasi.

Saat ini BPR dalam menentukan kriteria pembentukan CKPN sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh direksi Nomor : 10/SK/CMA/XII/2024 tanggal 30 Desember 2024.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b. Liabilitas

Liabilitas adalah kewajiban kini BPR yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan arus keluar dari sumber daya BPR. Penyelesaian kewajiban kini biasanya melibatkan pembayaran kas, pengalihan aset lain, pemberian jasa, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban lain, atau konversi kewajiban menjadi ekuitas. Kewajiban juga dapat dihapuskan dengan cara seperti kreditur membebaskan atau membatalkan haknya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.20, paragraf 2.21, dan lampiran B).

Liabilitas diakui dalam laporan posisi keuangan ketika:

- BPR memiliki kewajiban pada akhir periode pelaporan sebagai hasil dari peristiwa masa lalu;
- Kemungkinan besar BPR akan menyelesaikan liabilitas tersebut dengan menyerahkan asetnya; dan
- Nilai liabilitas dapat diukur secara andal.

1). Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat (di luar bank umum atau BPR lain) kepada BPR berdasarkan perjanjian penyimpanan dana.

Simpanan merupakan liabilitas keuangan. Pengakuan awal sebesar nilai sekarang kas yang disampaikan ke BPR dikurangi biaya transaksi. Pengukuran selanjutnya menggunakan biaya perolehan diamortisasi. Jika tidak terdapat biaya transaksi, nilai pada umumnya sama dengan jumlah kas yang akan dibayarkan dan tidak didiskontokan.

Bentuk-bentuk simpanan berupa:

- Tabungan adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh penabung. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Dalam hal terdapat amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada tabungan maka diakui sebagai beban bunga. Perhitungan beban bunga menggunakan suku bunga efektif. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban BPR kepada pemilik tabungan.
- Deposito adalah simpanan milik pihak ketiga pada BPR yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan BPR. Deposito yang dimaksud adalah deposito yang berjangka waktu. Transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Amortisasi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada deposito diakui sebagai beban bunga. Deposito disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum jatuh tempo disajikan dalam pos utang bunga.
- Bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b. Liabilitas (*lanjutan*)

2). Simpanan Dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah liabilitas BPR berupa tabungan dan deposito dari bank lain di Indonesia. Simpanan dari bank lain berupa tabungan dan deposito. Simpanan dari bank lain tidak termasuk pinjaman dari bank lain yang akan dicatat pada pos pinjaman yang diterima.

Tabungan dari bank lain, bahwa transaksi tabungan diakui sebesar nominal penyetoran atau penarikan yang dilakukan oleh bank lain. Setoran tabungan diakui pada saat uang diterima. Bunga yang diberikan atas tabungan diakui sebagai penambah nominal tabungan. Tabungan disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar kewajiban BPR kepada bank lain pemilik tabungan.

Deposito dari bank lain, bahwa transaksi deposito diakui sebesar nilai nominal yang tercantum dalam bilyet deposito. Setoran deposito diakui pada saat uang diterima. Bunga yang ditambahkan pada nominal deposito diakui sebagai penambah deposito. Deposito dari bank lain disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar estimasi/jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban. Kewajiban bunga deposito yang belum atau yang sudah jatuh tempo disajikan dalam pos Utang Bunga.

3). Liabilitas Segera

Liabilitas segera adalah liabilitas BPR yang telah jatuh tempo dan atau yang segera dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayar. Liabilitas segera berasal dari aktivitas pendukung kegiatan operasional BPR baik terhadap masyarakat maupun terhadap bank lain. Tidak termasuk dalam liabilitas segera adalah utang bunga.

Jenis liabilitas segera antara lain: penutupan rekening deposito jatuh tempo; titipan nasabah; selisih lebih hasil penjualan agunan milik nasabah; dividen yang belum dibayarkan; liabilitas kepada pemerintah yang harus dibayar; sanksi liabilitas membayar kepada otoritas yang belum dibayarkan; gaji/honor/upah yang telah jatuh tempo namun belum dibayarkan. Komponen-komponen tersebut apabila jumlahnya material dikelompokkan dalam pos tersendiri.

Transaksi liabilitas segera diakui pada saat liabilitas telah jatuh tempo; atau liabilitas menjadi segera dapat ditagih oleh pemiliknya baik dengan perintah dari pemberi amanat maupun tidak. Liabilitas segera dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

4). Utang

- Utang Bunga

Utang bunga merupakan seluruh liabilitas BPR berupa liabilitas bunga kepada nasabah yang belum dibayarkan dari simpanan berupa tabungan maupun deposito dari pihak ketiga bukan bank dan dari bank lain, pinjaman yang diterima dari bank, serta utang bunga lain.

Termasuk dalam pengertian utang bunga adalah utang bunga yang timbul dari transaksi lainnya, seperti pinjaman yang diterima, dan pinjaman subordinasi. Utang bunga antara lain terdiri dari Liabilitas bunga yang telah menjadi beban BPR tetapi belum dibayar (akrual bunga). Bunga deposito yang telah jatuh tempo namun belum diambil oleh nasabah. Bunga dari transaksi lainnya yang sudah jatuh tempo namun belum diambil.

Utang bunga diakui sebesar jumlah bunga kontraktual, baik untuk akrual bunga maupun yang telah jatuh tempo. Penyajian Utang bunga disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

- Utang Pajak

Utang pajak adalah liabilitas pajak penghasilan badan yang terutang atas penghasilan BPR.

Dasar Pengaturan Utang Pajak ada pada SAK EP Bab 29 tentang Pajak Penghasilan dan juga PA BPR Bab XXIV tentang Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b. Liabilitas (*lanjutan*)

4). Utang (*Lanjutan*)

Utang pajak mencakup utang pajak atas PPh Pasal 29 (PPh Badan) yang dihitung setelah berakhir masa pajak tahunan, yaitu selisih kurang kewajiban pajak penghasilan BPR setelah memperhitungkan PPh Pasal 25 (angsuran pajak atau pajak dibayar di muka); dan/atau utang pajak yang telah ditetapkan oleh kantor pajak.

Utang Pajak diakui sebesar jumlah yang harus disetorkan ke kas negara. Penyajian Utang Pajak disajikan sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

5). Pinjaman

Pinjaman yang diterima adalah pinjaman yang diterima dari bank, Bank Indonesia dan/atau pihak ketiga bukan bank dengan kewajiban pembayaran kembali berdasarkan persyaratan perjanjian utang piutang. Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang memenuhi kriteria subordinasi, antara lain bersifat junior dan memiliki kedudukan yang hampir sama dengan modal.

Pengukuran awal yaitu pinjaman diakui sebesar nilai sekarang kas terutang (sebagai contoh, termasuk pembayaran bunga dan pelunasan pokok). (Hal ini mengacu pada SAK EP Paragraf 11.13). Pengukuran selanjutnya pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Pinjaman diterima dapat berasal dari bank umum, BPR lain, Bank Indonesia, atau pihak lain. Pinjaman diterima yang berasal dari Bank Indonesia berupa fasilitas pendanaan jangka pendek untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek yang dialami oleh BPR. Jenis pinjaman yang diterima antara lain: pinjaman bilateral; pinjaman sindikasi; pinjaman subordinasi; dan pinjaman khusus yang diterima dari lembaga pengayom maupun pinjaman dalam rangka linkage. Dalam ketentuan permodalan, pinjaman subordinasi masuk sebagai pinjaman dengan persyaratan tertentu sebagaimana POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR. Pinjaman yang diterima tidak termasuk: setoran keikutsertaan bank lain (bank peserta) dalam kredit sindikasi (pembiayaan bersama); atau dana yang diterima dalam rangka penerusan kredit (*channeling*).

Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok pinjaman ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan pinjaman, dikurangi bunga dibayar di muka jika ada (diskonto). Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung kepada perolehan pinjaman dan diskonto diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif dan diakui sebagai beban bunga. Bunga akrual atas pinjaman diterima diakui sebagai utang bunga. Penyajian Pinjaman yang diterima disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan sebesar saldo pinjaman yang belum dilunasi pada tanggal laporan serta biaya transaksi dan diskonto yang belum diamortisasi. Bunga yang masih harus dibayar disajikan dalam pos utang bunga. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik oleh BPR disajikan sebagai tagihan komitmen pada pos fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik. Penempatan BPR berupa giro pada bank umum yang bersaldo kredit (*overdraft*) disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai pinjaman diterima.

6). Dana Setoran Modal-Liabilitas

Dana Setoran Modal (DSM) – Liabilitas adalah dana yang telah disetor penuh oleh pemegang saham atau calon pemegang saham dan diblokir untuk penambahan modal, namun belum memenuhi ketentuan permodalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DSM – Liabilitas tidak memenuhi kriteria instrumen ekuitas karena masih terdapat unsur ketidakpastian di mana BPR tetap memiliki liabilitas kontraktual sehingga harus mengembalikan dana tersebut apabila tidak memenuhi ketentuan untuk diakui sebagai modal disetor sesuai dengan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum Bank Perkreditan Rakyat. Dana setoran modal yang dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan kewajiban BPR kepada penyeter. Dana setoran modal yang telah dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku merupakan bagian dari ekuitas BPR.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

b. Liabilitas (*lanjutan*)

6). Dana Setoran Modal-Liabilitas (*Lanjutan*)

Dana setoran modal yang diterima diakui sebagai DSM - Liabilitas. DSM - Liabilitas yang dinyatakan telah memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku diakui sebagai DSM - Ekuitas. Penyajian DSM – Liabilitas disajikan dalam pos tersendiri pada laporan posisi keuangan.

7). Liabilitas Imbalan Kerja

Imbalan kerja adalah seluruh bentuk imbalan yang diberikan BPRatas jasa yang diberikan oleh pekerja, termasuk direktur dan manajemen. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)b. Liabilitas imbalan kerja adalah liabilitas yang timbul dari imbalankerja.

Liabilitas imbalan kerja terdiri dari: imbalan kerja jangka pendek; imbalan pascakerja; imbalan kerja jangka panjang lainnya; dan pesangon. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.1)

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek: Secara umum diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto (*undiscounted amount*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.5)

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui sebesar jumlah terdiskonto (*discounted amount*).

Khusus untuk liabilitas imbalan pascakerja program imbalan pastidan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya, BPR mengukur liabilitas pada total neto dari jumlah nilai kini liabilitas imbalan, dikurangi nilai wajar aset program (jika ada), pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf28.15 dan 28.30).

Khusus untuk pesangon, BPR mengakui pesangon sebagai beban dalam laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pesangon tidak memberikan manfaat ekonomik kepada BPR di masa depan. Pesangon diakui sebagai liabilitas dan beban hanya ketika BPR menunjukkan komitmennya untuk melakukan pemberhentian kontrak kerja sebelum tanggal pensiun normal, yang ditunjukkan dengan rencana formal terperinci untuk menghentikan pekerja dan tidak terdapat kemungkinan yang realistis untuk membatalkan rencana tersebut; atau memberikan pesangon sebagai hasil dari penawaran yang dilakukan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.34 dan 28.35)2). BPR mengukur pesangon pada estimasi terbaik dari pengeluaran untuk menyelesaikan kewajiban. Jika pesangon diberikan untuk mendorong pengurangan tenaga kerja secara sukarela, pengukuran pesangon didasarkan pada jumlah pekerja yang diperkirakan akan menerima tawaran tersebut. Jika pesangon jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, pesangon diukur pada nilai sekarang terdiskonto. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 28.36 dan 28.37).

Penyajian Liabilitas imbalan kerja jangka pendek disajikan dalam pos Liabilitas segera pada laporan posisi keuangan. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang disajikan dalam pos liabilitas lainnya pada laporan posisi keuangan.

8). Liabilitas Lainnya

Liabilitas lainnya merupakan pos yang mencakup liabilitas BPR yang tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu pos liabilitas yang ada dan tidak cukup material untuk disajikan dalam pos tersendiri.

Termasuk dalam liabilitas lainnya antara lain dana yang diterima BPR dari pihak ketiga bukan bank dalam rangka penerusan kredit tetapi belum disalurkan kepada nasabah dan liabilitas imbalan kerja jangka panjang.

Pengakuan dan Pengukuran Liabilitas lainnya diakui dalam hal BPR menjadi salah satu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut dan pada umumnya diukur sebesar jumlah yang harus diselesaikan. Penyajian Liabilitas lainnya disajikan dalam pos Liabilitas lain-lain pada laporan posisi keuangan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

6 Laporan Posisi Keuangan (*Lanjutan*)

c. Ekuitas

Ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi seluruh liabilitasnya. BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau sebagai ekuitas sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3 dan 22.4).

1). Modal

Modal Dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan anggaran dasar.

Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara riil dan efektif diterima BPR.

Agio yaitu selisih lebih tambahan modal yang diterima BPR sebagai akibat harga saham yang melebihi nilai nominalnya.

Modal sumbangan yaitu modal yang diterima BPR yang berasal dari sumbangan dalam bentuk dana atau aset lainnya.

2). DSM (Dana Setoran Modal) Ekuitas

DSM – Ekuitas yaitu dana yang telah disetor secara riil untuk tujuan penambahan modal namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk dapat digolongkan sebagai modal disetor seperti Rapat Umum Pemegang Saham atau Rapat Anggota maupun pengesahan anggaran dasar dari instansi yang berwenang.

Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. (Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Perlakuan terhadap modal dilakukan sesuai ketentuan permodalan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain Undang-Undang terkait perseroan terbatas, Undang-Undang terkait koperasi, POJK mengenai BPR, dan POJK mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum BPR.

Modal disetor diakui pada saat BPR menerima setoran modal baik berupa dana kas maupun aset non-kas untuk selanjutnya diukur pada nilai wajar yang telah dikurangi biaya transaksi, jika ada. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.7 dan 22.8).

3). Saldo Laba

Saldo laba (laba ditahan) adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memperhitungkan pembagian dividen, koreksi laba rugi periode lalu, dan reklasifikasi surplus revaluasi aset tetap (yang telah masuk sebagai bagian saldo laba).

Saldo laba umumnya dikelompokkan menjadi:

1) Cadangan umum yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal dan telah mendapat persetujuan RUPS.

2) Cadangan tujuan yaitu cadangan yang dibentuk dari laba neto setelah pajak yang tujuannya telah ditetapkan dan telah mendapat persetujuan RUPS.

3) Saldo laba yang belum ditentukan tujuannya, terdiri dari:

a) laba tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya; dan

b) laba tahun berjalan.

Seluruh saldo laba dianggap bebas untuk dibagikan sebagai dividen dengan tetap memperhatikan pemenuhan ketentuan pembagian dividen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saldo laba yang tidak tersedia untuk dibagikan sebagai dividen karena pembatasan-pembatasan dilaporkan dalam pos tersendiri yang menggambarkan tujuan pencadangan yang dimaksud.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

a. Penghasilan dan Beban

Penghasilan diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi peningkatan manfaat ekonomik masa depan terkait peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.41).

Penghasilan terdiri dari:

1). Pendapatan Operasional

Pendapatan operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR. Pendapatan operasional terdiri dari pendapatan bunga, yaitu pendapatan dari penanaman dana BPR dalam bentuk aset produktif; dan pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga dari perjanjian kredit diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui secara akrual, yaitu dampak dari transaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Pendapatan Bunga terdiri dari:

- Pendapatan bunga kontraktual, yaitu pendapatan bunga yang diterima oleh BPR sesuai dengan perjanjian dengan pihak lain atas surat berharga, penempatan pada bank lain, atau kredit yang diberikan (tidak termasuk amortisasi provisi atau biaya transaksi);
- Provisi kredit, yaitu pendapatan yang diterima BPR atas provisi kredit yang diberikan; Provisi diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi provisi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Amortisasi provisi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi provisi.
- Biaya transaksi, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh BPR yang terkait secara langsung dengan penempatan sertifikat Bank Indonesia, penempatan pada bank lain serta kredit yang diberikan. Biaya transaksi mencakup semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Dalam hal biaya transaksi dibebankan kepada nasabah maka biaya tersebut tidak termasuk dalam biaya perolehan pemberian kredit; dan
Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR diamortisasi selama masa kredit dengan menggunakan suku bunga efektif. Amortisasi biaya transaksi tersebut diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. Amortisasi Biaya transaksi dilakukan tanpa memperhatikan apakah kredit termasuk performing atau non-performing. Pada saat kredit non-performing, BPR mengakui pendapatan dari amortisasi biaya transaksi.
- Koreksi pendapatan bunga, yaitu koreksi pendapatan bunga akrual atas aset produktif yang mengalami penurunan kualitas atau penurunan nilai, sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Lainnya

Pendapatan lainnya berasal dari kegiatan jasa yang mendukung operasional BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat. Bentuk pendapatan lainnya antara lain:

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

- Pendapatan jasa transaksi (seperti payment point dan ATM);
- Keuntungan dari penjualan valuta asing;
- Keuntungan penjualan surat berharga;
- Penerimaan aset produktif yang dihapus buku;
- Pemulihan CKPN aset keuangan;
- Dividen;
- Keuntungan dari penyertaan dengan equity method;
- Keuntungan penjualan AYDA;
- Pendapatan ganti rugi asuransi; dan
- Pemulihan penurunan nilai AYDA.

Pendapatan lainnya diakui pada saat memenuhi persyaratan sebesar jumlah yang menjadi hak BPR.

2). Beban Operasional

Beban operasional adalah semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan usaha utama BPR.

Beban diakui BPR dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain ketika telah terjadi penurunan manfaat ekonomik masa depan terkait penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang dapat diukur secara andal. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.42).

Beban operasional diakui secara akrual, yaitu dampak daritransaksi dan peristiwa lainnya yang diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

Beban Operasional terdiri dari:

- Beban Bunga

Beban bunga, yaitu beban bunga atas kegiatan penghimpunan dana atau penerimaan pinjaman BPR, seperti tabungan atau deposito, pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lain. Beban bunga termasuk amortisasi biaya transaksi dan provisi pinjaman yang diterima serta amortisasi biaya promosi yang dapat diatribusikan secara langsung pada rekening tabungan atau deposito. Beban bunga antar kantor tidak dilaporkan pada pos ini tetapi dilaporkan pada pos beban non operasional sesuai ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat;

- Beban kerugian restrukturisasi kredit

Beban kerugian restrukturisasi kredit, yaitu amortisasi cadangan kerugian yang timbul atas penurunan nilai kredit akibat restrukturisasi setelah diperhitungkan dengan kelebihan CKPN aset keuangan karena perbaikan kualitas kredit dalam rangka restrukturisasi;

- Beban kerugian penurunan nilai

Beban kerugian penurunan nilai, yaitu CKPN aset produktif antara lain berupa kredit yang diberikan, surat berharga yang dimiliki, dan penempatan pada bank lain. Detil mengenai kerugian penurunan nilai dapat merujuk standar akuntansi keuangan mengenai instrumen dasar. Pembentukan beban kerugian penurunan nilai sebesar nilai tercatat kredit yang diberikan tidak semata merupakan penghentian pengakuan karena BPR masih memiliki hak kontraktual atas penerimaan arus kas masadatang yang berasal dari kredit yang diberikan;

Beban kerugian penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan, BPR mengakui dan mengukur berdasarkan bukti objektif. Jika pada periode berikutnya, jumlah beban kerugian penurunan nilai menurun, maka BPR menyajikan jumlah perbaikan pada pemulihan CKPN pada pendapatan operasional lainnya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

a. Penghasilan dan Beban (*Lanjutan*)

- Beban pemasaran

Beban pemasaran, yaitu biaya yang berkaitan dengan promosi produk perbankan BPR antara lain biaya edukasi terhadap masyarakat tentang produk perbankan BPR, biaya pemberian hadiah yang tidak dapat diatribusikan langsung pada rekening nasabah, dan biaya iklan untuk promosi;

- Beban penelitian dan pengembangan

Beban penelitian dan pengembangan, yaitu biaya yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR. Termasuk pada pos ini yaitu: (1) biaya perjalanan dan akomodasi terkait dengan penyelenggaraan penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh BPR, (2) biaya penelitian dan pengembangan untuk pendirian dan pembukaan kantor cabang BPR, dan (3) beban pengeluaran yang terjadi secara internal pada suatu item aset tak berwujud;

- Beban administrasi dan umum

Beban administrasi dan umum, termasuk beban tenaga kerja, beban pendidikan & pelatihan, beban sewa, beban penyusutan/penghapusan atas aset tetap & inventaris, beban amortisasi aset takberwujud, beban premi asuransi, beban pemeliharaan dan perbaikan, beban barang & jasa, beban penyelenggaraan, teknologi informasi, kerugian terkait risiko operasional, dan pajak-pajak;

- Beban lainnya

Beban lainnya, yaitu beban operasional lainnya termasuk kerugian penjualan valuta asing, kerugian penjualan surat berharga, kerugian dari penyertaan dengan equity method, kerugian penjualan AYDA, kerugian penurunan nilai AYDA, dan biaya pungutan OJK.

Beban - beban lain seperti beban pemasaran, beban penelitian dan pengembangan, dan beban administrasi dan umum diakui pada saat terjadinya (dan bukan pada saat kas atau setara kas dibayarkan) dan dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan pada periode yang terkait.

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional

1). Pendapatan Non Operasional

Pendapatan Non operasional merupakan semua pendapatan yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

Pendapatan Non operasional diakui sebesar jumlah yang menjadi hak BPR. BPR mengakui pendapatan Non operasional menggunakan dasar akuntansi akrual, yaitu diakui ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk akun tersebut.

Pendapatan Non Operasional terdiri dari:

- Keuntungan penjualan, yaitu keuntungan karena penjualan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Pemulihan penurunan nilai, termasuk penurunan nilai wajar atas aset tetap dan inventaris milik BPR yang sebelumnya telah mengalami penurunan nilai;
- Bunga antar kantor, yaitu pendapatan bunga yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan pendapatan bunga antar kantor untuk laporan perkantor dilaporkan secara tidak saling hapus dengan beban bunga antar kantor (*gross*), sedangkan untuk laporan gabungan disajikan secara saling hapus (*offsetting/net*);
- Selisih kurs, yaitu keuntungan selisih kurs berupa selisih lebih antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya;
- Pendapatan lainnya, yaitu seluruh pendapatan operasional yang diperoleh BPR selain pendapatan bunga yang tidak dapat dikelompokkan seperti di atas. Termasuk pada pos ini yaitu pendapatan yang diperoleh atas penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapus tagih; sebagaimana diatur dalam ketentuan OJK mengenai laporan bulanan bank perekonomian rakyat.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

b. Pendapatan dan Beban Non Operasional (*Lanjutan*)

2). Beban Non Operasional

Beban Non operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR.

Beban nonoperasional diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang harus diselesaikan.

Beban Non Operasional terdiri dari:

- Kerugian penjualan/kehilangan, yaitu kerugian karena penjualan atau kehilangan aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Kerugian penurunan nilai, yaitu kerugian atas penurunan nilai wajar aset tetap dan inventaris milik BPR;
- Bunga antar kantor, yaitu beban bunga atas dana yang berasal dari transaksi antar kantor. Pelaporan beban bunga antar kantor untuk keperluan laporan keuangan bertujuan umum secara gabungan disajikan secara saling hapus(offsetting/net);
- Selisih kurs, yaitu kerugian selisih kurs berupa selisih kurang antara nilai tercatat mata uang asing berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal pelaporan dengan nilai tercatat sebelumnya; dan
- Beban lainnya, termasuk sanksi administratif berupa denda karena suatu pelanggaran dan sumbangan yang diberikan BPR.

c. Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan

1). Pajak Kini

Pajak kini adalah pajak penghasilan terutang (dapat dipulihkan)terkait dengan laba kena pajak (rugi pajak) untuk periode berjalan atau periode lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Beban pajak penghasilan diakui dalam laporan laba rugi BPR sebagai bagian dari biaya operasional. Pengakuan ini harus dilakukan pada periode pelaporan yang sesuai dengan prinsip akrual, yaitu beban pajak harus diakui pada saat pendapatan diperoleh atau biaya terjadi, bukan pada saat pembayaran dilakukan.

Beban pajak penghasilan diukur berdasarkan tarif pajak yang berlaku pada periode pelaporan yang bersangkutan. Tarif pajak yang digunakan dapat berbeda tergantung pada jenis pendapatan atau pengeluaran, serta peraturan pajak yang berlaku.

2). Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan adalah pajak penghasilan terutang atau dapat dipulihkan pada periode mendatang, umumnya sebagai hasil dari BPR memulihkan atau menyelesaikan aset dan liabilitas pada jumlah tercatat kini, dan dampak pajak dari akumulasi rugi pajak kini belum dikompensasi dan kredit pajak kini belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.1)

Aset pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer dapat dikurangkan di masa depan. Perbedaan temporer adalah perbedaan antara jumlah tercatat aset atau liabilitas dalam laporan posisi keuangan dan dasar pengenaan pajaknya. Aset pajak tangguhan juga diakui untuk akumulasi rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak masa depan akan tersedia untuk dimanfaatkan dengan rugi pajak belum dikompensasi dan kredit pajak belum dimanfaatkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 29.12 dan 29.21)

Liabilitas pajak tangguhan diakui ketika terdapat perbedaan temporer kena pajak.

Liabilitas dan aset pajak tangguhan diukur menggunakan tarif pajak dan undang-undang pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan saling hapus pada jumlah neto Pajak Tangguhan.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

7 Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain (*Lanjutan*)

c. Beban Pajak Penghasilan dan Pajak Tangguhan (*Lanjutan*)

Saat ini BPR Belum menyajikan Pajak Tangguhan.

d. Laporan Penghasilan Komprehensif Lain

Penghasilan komprehensif lain adalah item penghasilan dan beban (termasuk penyesuaian reklasifikasi) yang tidak diakui dalam laba rugi yang disyaratkan atau diizinkan oleh standar akuntansi keuangan.

Penghasilan komprehensif lain timbul dari poin dalam SAK EP Bab 5 Paragraf 5.4 (b). Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap. Surplus revaluasi aset tetap tidak direklasifikasikan ke laba rugi. Umumnya pada BPR yang relevan hanya terkait surplus revaluasi aset tetap bila BPR memilih kebijakan akuntansi revaluasi untuk aset tetapnya (lihat bab IX tentang Aset Tetap dan Inventaris). Surplus revaluasi aset tetap tidak di reklasifikasikan ke laba rugi.

8 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyediakan informasi perubahan kas dan setara kas BPR untuk periode pelaporan. Laporan arus kas menunjukkan secara terpisah penerimaan dan pengeluaran kas BPR dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.1)

Aktivitas operasi adalah aktivitas utama yang menghasilkan pendapatan bagi BPR dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

Aktivitas investasi adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

Aktivitas pendanaan adalah aktivitas yang timbul dari perubahan dalam ukuran dan komposisi ekuitas dan pinjaman BPR yang dikontribusikan.

BPR menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung, dengan metode ini pos-pos utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 7.7)

Kas terdiri atas:

- 1) kas dalam rupiah dan kas dalam valuta asing;
- 2) rekening giro pada bank lain;
- 3) tabungan pada bank atau BPR lain.

b. Setara kas, antara lain:

- 1) surat berharga dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan;
- 2) deposito dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

9 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk suatu periode, item penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut, dampak perubahan dalam kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui pada periode tersebut dan (tergantung pada format laporan dari perubahan ekuitas yang dipilih oleh BPR) jumlah transaksi dengan pemilik yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pemilik selama periode tersebut.

10 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR. Catatan atas laporan keuangan memuat penjelasan mengenai gambaran umum BPR, ikhtisar kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos laporan keuangan dan informasi penting lainnya.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

11 Instrumen Keuangan

- Instrumen keuangan adalah kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada BPR dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas pada entitas lainnya. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.3).
- BPR mengklasifikasikan instrumen keuangan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas keuangan sesuai dengan substansi pengaturan kontraktualnya dan tidak hanya dari bentuk hukumnya (*substance over form*). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).
- Instrumen keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan jika BPR harus menyelesaikan kewajiban kontraktualnya melalui penyerahan kas atau aset lain. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 22.3A).

12 Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode pengalokasian penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama umur instrumen keuangan ke jumlah tercatat aset atau liabilitas keuangan tersebut. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.16).

13 Pengukuran Aset Non Keuangan dan Liabilitas Non Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46). Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- Semisal Aset Tetap yaitu dengan model biaya, diukur pada yang lebih rendah antara biaya perolehan dikurangi akumulasi depresiasi dan akumulasi penurunan nilai dengan jumlah terpulihkan; atau Model revaluasi, diukur pada yang lebih rendah antara jumlah revaluasian dan jumlah terpulihkan.
- BPR mengakui kerugian penurunan nilai terkait aset nonkeuangan yang digunakan atau dikuasai untuk dijual, sebagai contoh aset yang diambil alih.
- SAK EP mengizinkan atau mensyaratkan pengukuran pada nilai wajar untuk: investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama yang diukur BPR pada nilai wajar; properti investasi yang diukur BPR pada nilai wajar; dan aset tetap yang diukur BPR dengan model revaluasi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.50).
- Kebanyakan liabilitas selain liabilitas keuangan diukur pada estimasi terbaik atas jumlah yang disyaratkan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal pelaporan. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.51).

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

14 Pengukuran Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Pada pengakuan awal, BPR mengukur aset dan liabilitas keuangan pada biaya historis kecuali SAK EP mensyaratkan pengukuran awal dengan dasar lainnya seperti nilai wajar. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.46) Selanjutnya aset dan liabilitas diukur dengan dasar pengukuran lainnya sebagai berikut:

- BPR mengukur aset keuangan dasar dan liabilitas keuangan dasar pada biaya perolehan diamortisasi (*amortised cost*) dikurangi penurunan nilai. Pengukuran ini dikecualikan untuk: investasi dalam saham preferen yang tidak dapat dikonversi; dan saham biasa atau saham preferen tanpa opsi jual yang diperdagangkan secara publik atau yang nilai wajarnya dapat diukur dengan andal tanpa biaya atau upaya yang berlebihan. Investasi dan saham di atas diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.47).
- Aset keuangan dan liabilitas keuangan lainnya diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi kecuali disyaratkan lain oleh SAK EP. (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.48)
- Biaya perolehan diamortisasi aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah nilai bersih dari: jumlah saat pengakuan awal; dikurangi setiap pelunasan pokok; ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif; dan dikurangi penurunan nilai (untuk aset keuangan). (Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 11.15).

15 Saling Hapus

- BPR tidak diperbolehkan melakukan saling hapus aset dan liabilitas atau penghasilan dan beban. Saling hapus hanya diperbolehkan dalam rangka penyajian untuk transaksi yang memiliki sifat yang sama, sebagai contoh keuntungan selisih kurs dan kerugian selisih kurs.
- Pengukuran aset secara neto dengan nilai penyisihan bukan merupakan saling hapus.
- Jika aktivitas operasi normal BPR tidak mencakup pembelian atau penjualan aset tidak lancar, maka BPR melaporkan Keuntungan dan kerugian pelepasan aset tersebut dengan cara mengurangi hasil pelepasan dengan jumlah tercatat asetnya dan beban penjualan terkait.
(Hal ini mengacu pada SAK EP paragraf 2.52)

16 Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Keuangan

Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan adalah peristiwa-peristiwa, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi antara akhir periode pelaporan (tanggal laporan posisi keuangan) dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.

Sampai dengan akhir pemeriksaan bahwa BPR tidak terdapat Peristiwa Setelah Akhir Periode Pelaporan Keuangan.

17 Pengungkapan Pihak Berelasi

Tujuannya adalah memastikan bahwa laporan keuangan berisi pengungkapan yang diperlukan untuk menarik perhatian pada kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak berelasi. Pihak berelasi dijelaskan pada transaksi akun Kredit terkait dan Simpanan terkait.

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

C.1 Kas

Saldo Kas 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Kas Gabungan	650.803.500	816.381.950
Saldo	<u>650.803.500</u>	<u>816.381.950</u>

C.2 Penempatan Pada Bank Lain

Saldo Penempatan Pada Bank Lain 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	<i>Selisih Rekonsiliasi 2025 yang dijurnal BPR di Januari 2026</i>	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Giro:			
Giro BANK BCA	30.137.157,03	11.191.492.080	7.387.333.465
Giro BANK MANDIRI	12.960.715,05	3.696.032.613	7.622.144.478
Giro BANK MANDIRI 2	4.999.999,80	175.626.959	-
Giro BANK PERMATA	4.556.555,45	4.581.275.405	12.268.089.196
Giro BANK BRI	13.004.999,70	1.204.518.186	4.807.561.703
Giro BANK BRI 2	43.056.599,90	2.122.577.334	-
Giro BANK BPD	584.065,00	578.631.596	409.009.869
Giro BANK BNI	1.358.848,00	1.019.444.899	683.705.000
GIRO BTN SYARIAH		-	928.450.671
Saldo Giro:	110.658.940	<u>24.569.599.072</u>	<u>34.106.294.382</u>
Tabungan:			
Tabungan BANK BCA		-	595.718.497
Saldo Tabungan:		<u>-</u>	<u>595.718.497</u>

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Penempatan Pada Bank Lain (Lanjutan)

Deposito:

Deposito BANK JATENG	100.000.000	100.000.000
Deposito BANK BPD DIY	200.000.000	200.000.000
Deposito BANK Mayapada	3.000.000.000	-
Deposito BPR ALTO MAKMUR	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR ALTO MAKMUR	500.000.000	-
Deposito BPR DANAGUNG SYARIAH	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR DANAGUNG SYARIAH	300.000.000	300.000.000
Deposito BPR DANAGUNG	500.000.000	500.000.000
Deposito BPRS HIK MITRA CAHAYA INDONESIA	1.000.000.000	-
Deposito BPRS CAHAYA HIDUP	500.000.000	-
Deposito BPRS CAHAYA HIDUP	400.000.000	-
Deposito BPR CEPER	-	1.000.000.000
Deposito BPR CEPER	500.000.000	-
Deposito BPR CEPER	500.000.000	-
Deposito BPRS MADINA	-	1.000.000.000
Deposito BPRS MADINA	500.000.000	-
Deposito BPRS MADINA	500.000.000	-
Deposito BPR KURNIA SEWON	500.000.000	-
Deposito BPR KURNIA SEWON	500.000.000	-
Deposito BPR WIRA ARDANA SEJAHTERA	500.000.000	500.000.000
Deposito BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	250.000.000	250.000.000
Deposito BPRS UNISIA INSAN INDONESIA	1.000.000.000	-
Deposito BPR LESTARI JOGJA	-	1.000.000.000
Deposito BPR LESTARI JOGJA	500.000.000	-
Deposito BPR LESTARI JOGJA	500.000.000	-
Deposito BPR Indra Candra	1.000.000.000	-
Deposito BPR SYARIAH SLEMAN	500.000.000	-
Deposito BPR SYARIAH SLEMAN	500.000.000	-
Deposito BPR SENTRAL MANDIRI	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR Bank Jombang Perseroda	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	500.000.000
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	-
Deposito BPR PANCADANA(TERKAIT LIK)	500.000.000	-
Deposito BPR BRILIAN INVESTAMA	1.000.000.000	1.000.000.000
Deposito BPR AMBARKETAWANG PERSADA	1.000.000.000	-
Deposito BPR ARTHA KARYA USAHA	900.000.000	-
Deposito BPR NUSAMBA BANGUNTAPAN	1.000.000.000	-

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Penempatan Pada Bank Lain (Lanjutan)

Deposito:

Deposito BPR METROPOLITAN PUTERA (TERKAIT)	250.000.000	-
Deposito BPR METROPOLITAN PUTERA (TERKAIT)	1.000.000.000	-
Deposito BPRS MITRA HARMONI	500.000.000	-
Deposito BPR KLATEN SEJAHTERA	500.000.000	-
Deposito BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	500.000.000	-
Deposito BPRS CENTRAL SYARIAH UTAMA	500.000.000	-
Deposito BPR SAUDARA KITA(TERKAIT)	1.000.000.000	-
Deposito BPR MODERN EXPRESS	1.000.000.000	-
Deposito BPR DP TASPEN	1.000.000.000	-
Deposito BPRS AL HIJRAH AMANAH	500.000.000	-
Deposito BPRS KEDUNG ARTO	500.000.000	-
Deposito BPRS KEDUNG ARTO	500.000.000	-
Deposito BPR HALDEN PRIME	500.000.000	-
Deposito BPR INTAN NASIONAL(TERKAIT)	500.000.000	-
Deposito BPR RAMA GANDA	500.000.000	-
Deposito BPR NBP 29	500.000.000	-
Deposito BPR KARYA PRIMA SENTOSA	500.000.000	-
Deposito BPR NBP 11	500.000.000	-
Deposito BPR DELANGGU RAYA	500.000.000	-
Deposito BPR RAMA GANDA	-	1.000.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	1.000.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	500.000.000
HOSSING (TERKAIT) 3 BILYET LIKUIDITAS	-	500.000.000
Saldo Deposito:	34.000.000.000	12.450.000.000
Saldo Penempatan Pada Bank Lain	58.569.599.072	47.152.012.879

CKPN Penempatan Pada Bank Lain

Saldo 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo Awal	(123.512.497)	(103.569.980)
Pembentukan penyisihan selama thn berjalan	(155.559.848)	(114.693.273)
Penyesuaian/ Pembalikan tahun berjalan	194.211.267	94.750.756
Saldo CKPN Penempatan Pada Bank Lain	(84.861.078)	(123.512.497)

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.3 Kredit Yang Diberikan

Saldo Kredit Yang Diberikan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
1. Berdasarkan Jenis Penggunaan		
KYD - KREDIT MODAL KERJA	90.563.579.990	
KYD - KREDIT INVESTASI	116.287.012.489	
KYD - KREDIT KONSUMTIF	41.149.156.551	
KYD - KREDIT KARYAWAN INTERNAL	101.798.070	
Pinjaman Berjangka		98.374.164.740
Pinjaman Angsuran		235.156.638.850
Saldo Berdasarkan Jenis Penggunaan	248.101.547.099	333.530.803.590
SELISIH FLAT VS EIR	2.814.085.832	
2. Berdasarkan Kolektibilitas Kredit		
Lancar	109.126.027.980	180.432.978.522
Dalam Perhatian Khusus	38.195.298.791	68.674.383.591
Kurang Lancar	8.681.133.519	2.344.285.538
Diragukan	10.378.586.801	6.685.184.443
Macet	81.720.500.009	75.393.971.496
Saldo Berdasarkan Kolektibilitas Kredit	248.101.547.099	333.530.803.590
3. Berdasarkan Keterkaitan		
Pihak terkait	-	-
Pihak Tidak Terkait	248.101.547.099	333.530.803.590
Saldo Berdasarkan Keterkaitan	248.101.547.099	333.530.803.590
Biaya Provisi, Administrasi dan Transaksi	2025	2024
Saldo 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Provisi dan administrasi Kredit	(893.838.113)	(1.196.271.786)
Biaya Transaksi	74.480.175	186.517.855
Saldo	(819.357.938)	(1.009.753.931)
Pendapatan Bunga Ditangguhkan	2025	2024
Saldo Pendapatan Bunga Ditangguhkan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Pendapatan bunga yang ditangguhkan	(2.232.288.590)	(2.838.937.776)
Saldo Pendapatan Bunga Ditangguhkan	(2.232.288.590)	(2.838.937.776)
<i>Pendapatan bunga yang ditangguhkan merupakan dari proses restrukturisasi kredit</i>		
Saldo Kredit Yang Diberikan	247.863.986.403	329.682.111.883

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Kredit Yang Diberikan (*Lanjutan*)

CKPN Kredit Yang Diberikan	2025	2024
Saldo P 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Saldo Awal	(13.700.847.547)	(12.109.612.454)
Pembentukan penyisihan selama tahun berjalan	-	(3.373.469.602)
Penyesuaian/ Pembalikan tahun berjalan	4.281.022.983	1.524.968.379
Penghapusan Kredit Tahun Berjalan	-	257.266.131
Saldo CKPN Kredit Yang Diberikan	(9.419.824.564)	(13.700.847.547)

Manajemen berpendapat bahwa jumlah CKPN kredit yang telah dibukukan adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya kredit yang diberikan.

C.4 Agunan Yang Diambil Alih

	2025	2024
Merupakan agunan yang diambil alih oleh bank atas debitur yang tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank dengan rincian sebagai berikut :		
AYDA TANAH, BANGUNAN/RUMAH	21.925.550.004	12.425.315.455
Saldo Pinjaman Diterima	21.925.550.004	12.425.315.455

C.5 Aset Tetap

Saldo Aset Tetap 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2023	Penambahan	Pengurangan	2024
Harga Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.926.250.000			3.926.250.000
Kendaraan	470.065.000		333.415.000	136.650.000
Alat Kantor	2.194.244.431	40.515.700		2.234.760.131
Jumlah	6.590.559.431	40.515.700	333.415.000	6.297.660.131
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	(1.684.742.023)	(196.312.500)		(1.881.054.523)
Kendaraan	(387.044.162)	(28.020.835)	(333.415.000)	(81.649.997)
Alat Kantor	(1.807.887.889)	(134.864.892)		(1.942.752.781)
Jumlah	(3.879.674.074)	(162.885.727)	(333.415.000)	(3.905.457.301)
Nilai Buku :	2.710.885.357			2.392.202.830

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Aset Tetap (Lanjutan)

	2024	Penambahan	Pengurangan	2025
Harga Perolehan				
Tanah dan Gedung	3.926.250.000			3.926.250.000
Kendaraan	136.650.000			136.650.000
Alat Kantor	2.234.760.131	149.186.000		2.383.946.131
Jumlah	6.297.660.131	149.186.000	-	6.446.846.131
Akumulasi Penyusutan				
Gedung	(1.881.054.523)	(196.312.500)		(2.077.367.023)
Kendaraan	(81.649.997)	(15.000.000)		(96.649.997)
Alat Kantor	(1.942.752.781)	(136.166.392)		(2.078.919.173)
Jumlah	(3.905.457.301)	(151.166.392)	-	(4.252.936.193)
Nilai Buku :	2.392.202.830			2.193.909.939

C.6 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Harga Perolehan Aset Tak Berwujud	756.400.000	746.400.000
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(261.076.052)	(166.838.554)
Saldo Aset Tak Berwujud	495.323.948	579.561.446

C.7 Aset Lain-Lain

Saldo Lain-Lain 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA - ABA	-	
PENDAPATAN BUNGA YANG AKAN DITERIMA - KYD	2.136.607.606	3.362.476.947
Pajak Dibayar Dimuka	900.835.519	1.003.242.119
Biaya Dibayar Dimuka		
Sewa Gedung	687.500.000	-
Premi Asuransi Kas	4.970.415	4.970.428
Asuransi Tenaga Kerja	-	360.000.000
Asuransi Gedung	8.534.001	-
Biaya Dibayar Dimuka Lainnya	602.115.066	981.689.919
ALL-LAINNYA		
Penyelesaian Kredit	2.435.705.112	2.142.907.444
Materai	3.030.000	3.880.000
Deposit Pajak	3.690.627	-
Saldo Aset Lain-Lain	6.782.988.346	7.859.166.857

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.8 Liabilitas Segera	2025	2024
Saldo Liabilitas Segera 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Liabilitas Kepada Pemerintah		
PPh Tabungan	9.673.751	8.945.693
PPh Deposito	272.181.244	352.974.029
PPh 21	19.038.537	-
PPH 23 Jasa Lainnya	23.018	-
PPh lainnya	21.882.391	21.012.031
Liabilitas Segera Lainnya		
Titipan Nasabah	334.583.589	385.451.673
Titipan Biaya Notaris	-	2.500.000
Titipan Biaya Asuransi	22.097.117	29.766.526
Titipan Sementara	208.550.000	-
Lainnya	55.801.017	132.682.500
Saldo Liabilitas Segera	943.830.664	933.332.452
C.9 Simpanan	2025	2024
Saldo Simpanan 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
Berdasarkan Jenis		
Tabungan		
TABUNGAN MUKTI	12.149.592.127	10.822.622.865
TABUNGAN TAMASYA PLUS	11.497.831.054	10.865.389.562
TABUNGAN WISATA PLUS	365.573.620	247.833.640
TABUNGAN TABUNGANKU	3.941.857.831	5.197.336.401
TABUNGAN CMA PRIO	2.468.429.162	1.622.641.185
TABUNGAN RISMA	7.388.519.466	5.261.499.288
Saldo Tabungan	37.811.803.260	34.017.322.941
Berdasarkan Jangka waktu		
Deposito		
Deposito 1 bulan	84.972.049.731	118.460.568.160
Deposito 3 bulan	101.361.235.068	117.043.180.407
Deposito 6 bulan	38.850.640.027	44.036.968.831
Deposito 12 bulan	28.849.212.936	37.644.328.856
Deposito 36 bulan	6.028.219	5.663.905
Saldo Deposito	254.039.165.981	317.190.710.159
Saldo Simpanan	291.850.969.241	351.208.033.100

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Simpanan (Lanjutan)

Berdasarkan Keterkaitan

Tabungan

Terkait	72.781.029	72.359.296
Tidak Terkait	37.739.022.231	33.944.963.645
Saldo Tabungan	37.811.803.260	34.017.322.941

Deposito

Terkait	159.974.920	-
Tidak Terkait	253.879.191.061	317.190.710.159
Saldo Deposito	254.039.165.981	317.190.710.159

C.10 Liabilitas Imbalan Kerja

Saldo Liabilitas Imbalan Kerja 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Saldo Awal	109.200.000	63.200.000
Pembentukan	98.550.000	109.200.000
Pencairan	(109.200.000)	(63.200.000)
Saldo Liabilitas Imbalan Kerja	98.550.000	109.200.000

C.11 Liabilitas Lainnya

Saldo Liabilitas Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Utang Bunga Deposito	709.701.947	972.256.822
PPH Badan	350.000.000	472.644.182
Saldo Liabilitas Lainnya	1.059.701.947	1.444.901.004

C.12 Modal Disetor

Saldo Modal Disetor 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Modal Dasar	50.000.000.000	50.000.000.000
Modal yang belum disetor	(30.000.000.000)	(30.000.000.000)
Saldo Modal Disetor	20.000.000.000	20.000.000.000

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.13 Saldo Laba

Saldo Saldo Laba 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
Cadangan Umum	4.000.000.000	4.000.000.000
Cadangan Tujuan	-	-
Belum Ditentukan Tujuannya		
Laba Tahun Lalu	9.386.926.701	7.711.192.391
Laba Tahun Berjalan	1.637.497.017	1.675.734.310
Saldo Saldo Laba	15.024.423.717	13.386.926.701

C.14 Pendapatan Bunga Kontraktual

Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

Dari Bank Lain

	2025	2024
GIRO DARI BANK UMUM	490.368.649	825.225.209
TABUNGAN	7.002	44.900
DEPOSITO	1.859.497.659	1.385.886.296
Jumlah Dari Bank Lain	2.349.873.311	2.211.156.405

Dari Pihak Ketiga bukan Bank

PENDAPATAN BUNGA KYD	30.358.686.386	40.555.066.644
PENDAPATAN BUNGA TANGGUHAN	-	597.619.174
PENDAPATAN PROVISI	1.030.473.138	1.245.552.351
ADMINISTRASI DAN KOMISI	226.188.435	1.086.129.505
BIAYA TRANSAKSI	(141.099.680)	(130.878.633)
KOREKSI PENDAPATAN BUNGA	-	(63.606.251)
PENDAPATAN BUNGA EIR	2.814.085.832	-
Jumlah Dari Pihak Ketiga Bukan Bank	34.288.334.111	43.289.882.791
Jumlah Pendapatan Bunga Kontraktual	36.638.207.421	45.501.039.196

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.15 Pendapatan Operasional Lainnya	2025	2024
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :		
PENERIMAAN KREDIT YANG DIHAPUSBUKU	23.689.171	1.200.000
PEMULIHAN CKPN		
CKPN - KYD	4.281.022.983	1.524.968.379
CKPN - ABA	194.211.267	94.750.756
PENDAPATAN ATAS DENDA KETERLAMBATAN	1.430.534.353	1.341.368.425
PENDAPATAN ADMINISTRASI TABUNGAN		
BULANAN	127.958.118	134.908.378
TUTUP REKENING	7.558.183	12.918.933
GANTI BUKU TABUNGAN	552.000	663.000
PENDAPATAN PENALTY DEPOSITO	326.513	2.924.020
PENDAPATAN BUNGA DEBIUS	684.000	-
PENDAPATAN ADMINISTRASI KREDIT	2.250.000	3.550.000
PENDAPATAN SELISIH KAS	24.275	26.699
POL LAINNYA	254.247.688	1.011.145.505
Jumlah Pendapatan Operasional Lainnya	6.323.058.550	4.128.424.095

C.16 Beban Bunga

Jumlah Beban Bunga 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN BUNGA TABUNGAN	756.085.794	1.099.472.539
BEBAN BUNGA PHK KE III BBEBAN - DEPOSITO	19.588.229.853	21.711.979.149
BEBAN PREMI PENJAMINAN LPS	708.700.723	762.036.280
Jumlah Beban Bunga	21.053.016.370	23.573.487.968

C.17 Beban Kerugian Penurunan Nilai

Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN CKPN - PENEMPATAN PADA BANK LAIN	155.559.848	114.693.273
BEBAN CKPN - KYD	-	3.373.469.602
Jumlah Beban Kerugian Penurunan Nilai	155.559.848	3.488.162.875

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.18 Beban Pemasaran

Jumlah Beban Pemasaran 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

	2025	2024
BEBAN IKLAN	75.593.508	21.926.110
BEBAN TRANSAKSI	4.666.665	833.333
BEBAN HADIAH/UNDIAN	514.707.160	561.609.201
BEBAN LITERASI & INKLUSI	2.207.500	-
BEBAN LAINNYA PEMASARAN	88.571.344	27.374.900
Jumlah Beban Pemasaran	685.746.177	611.743.544

C.19 Beban Administasi dan Umum

Jumlah Beban Administasi Dan Umum 31 Desember 2025 Dan 2024 sebagai berikut :

Beban Tenaga Kerja	2025	2024
GAJI	8.666.705.188	9.641.283.165
UM& TRANS	1.095.036.000	1.713.616.000
BONUS/THR	1.482.166.745	1.880.424.948
LEMBUR	208.075.750	170.318.275
IMBALAN KERJA LAINNYA	357.991.327	334.394.100
BPJS - KETENAGAKERJAAN	-	32.402.974
BPJS - KESEHATAN	923.386.980	586.931.706
Sub Jumlah Beban Tenaga Kerja	12.733.361.990	14.359.371.168
Beban Pendidikan		
PENDIDIKAN	340.293.175	458.047.925
Beban Sewa		
BEBAN SEWA GEDUNG KANTOR	530.100.679	491.232.581
BEBAN SEWA KENDARAAN	523.507.540	533.812.756
BEBAN SEWA LAINNYA	17.327.372	17.414.022
Sub Jumlah Beban Sewa	1.070.935.591	1.042.459.359
Beban Penyusutan dan Amortisasi		
GEDUNG	196.312.500	196.312.500
INVENTARIS KENDARAAN	15.000.000	28.020.835
INVENTARIS PERABOT ALAT KANTOR	136.166.392	134.864.892
BEBAN AMORTISASI A.TIDAK BERWUJUD	94.237.498	65.796.873
Sub JumlahBeban Penyusutan dan Amortisasi	441.716.390	424.995.100

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025

(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

Beban Administasi dan Umum (Lanjutan)

Beban Premi Asuransi

BEBAN PREMI ASURANSI	459.000.000	-
ASURANSI CASH IN SAVE	11.660.013	11.659.992
ASURANSI KEBAKARAN	4.053.312	-
ASURANSI GEMPA	4.480.680	-
Sub Jumlah Beban Premi Asuransi	479.194.005	11.659.992

Beban Pemeliharaan & Perbaikan

BEBAN PEMELIHARAAN KENDARAAN	12.914.500	23.054.500
BEBAN GEDUNG KANTOR	10.460.500	67.654.500
PERALATAN KANTOR/INVENTARIS	26.081.000	18.266.000
PERBAIKAN LAINNYA	122.585.610	64.865.640
Sub Jumlah Beban Pemeliharaan & Perbaikan	172.041.610	173.840.640

Beban Barang & Jasa

BEBAN PERALATAN KANTOR	-	271.500
BEBAN ALAT TULIS KANTOR	135.668.925	151.836.071
BEBAN KOMUNIKASI	418.956.043	400.651.605
BEBAN LISTRIK	202.414.746	217.442.397
BEBAN BBM	497.809.614	565.340.816
BEBAN LITERASI/LANGGANAN KORAN, MAJALAH	4.445.000	3.539.000
BEBAN PHOTO COPY	2.159.146	2.270.166
BEBAN KEBUTUHAN RUMAH TANGGA	68.090.998	76.848.686
BEBAN PAM	2.791.480	4.169.480
BEBAN PARKIR&KEAMANAN	2.790.000	769.000
BEBAN KONSULTAN	41.580.000	20.000.000
BEBAN CETAKAN	213.147.860	196.716.761
BEBAN SERAGAM KARY	81.435.000	2.572.000
BEBAN PERJALANAN DINAS	54.662.550	95.801.400
BEBAN PENAGIHAN	1.071.754.082	740.670.477
BEBAN BARANG DAN JASA LAINNYA	717.575.225	527.704.959
Sub Jumlah Beban Barang & Jasa	3.515.280.669	3.006.604.318

Beban Pajak Non PPh

PBB	1.137.888	-
BEBAN PAJAK KENDARAAN	2.523.600	38.122.388
BEBAN PAJAK IKLAN	-	2.913.850
BEBAN PAJAK LAINNYA	5.321.937	-
Sub Jumlah Beban Pajak Non PPh	8.983.425	41.036.238

Jumlah Beban Administasi Dan Umum

18.761.806.854	19.518.014.740
-----------------------	-----------------------

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.20 Beban Operasional Lainnya

Jumlah Beban Operasional Lainnya 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
BEBAN ADMINISTRASI BANK	6.378.453	14.670.560
BEBAN ADM UM LAINNYA	28.759.570	221.866.266
BEBAN YANG DIBEBANKAN OLEH OJK	8.240.000	7.864.600
BEBAN OPERASIONAL LAINNYA	290.768.036	2.500.000
Jumlah Beban Operasional Lainnya	334.146.059	246.901.426

C.21 Pendapatan Non Operasional

Jumlah Pendapatan Non Operasional 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
PENJUALAN INVENTARIS	-	-
PENJUALAN AYDA	6.229.167	-
PENDAPATAN NON OPS FEE NOTARIS	24.909.500	47.249.500
PENDAPATAN NON OPS FEE ASURANSI	1.477.111	12.558.570
PENDAPATAN NON OPS SURAT KETERANGAN	4.205.000	4.865.000
PENDAPATAN NON OPS LAINNYA	40.660.675	69.228.966
Jumlah Pendapatan Non Operasional	77.481.453	133.902.036

C.22 Beban Non Operasional

Jumlah Beban Non Operasional 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
KERUGIAN KEHILANGAN/ PENJUALAN ASET TETAP	44.192.300	60.600.000
BEBAN OLAHRAGA / REKREASI	250.000	2.300.000
ENTERTAIN	3.199.800	808.700
SUMBANGAN	9.550.000	8.800.000
DANA SOSIAL	-	200.001
IURAN KEANGGOTAAN PERBARINDO/PERBANKAN	-	31.800.000
BEBAN NON OPS LAINNYA	3.783.000	72.167.580
Jumlah Beban Non Operasional	60.975.100	176.676.281

C.23 Taksiran Pajak Penghasilan

Jumlah Taksiran Pajak Penghasilan 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	2025	2024
	350.000.000	472.644.182

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

C. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN (LANJUTAN)

C.24 Komitmen dan Kontijensi

Jumlah Komitmen Dan Kontijensi 31 Desember 2025 Dan 2024 Sebagai Berikut :

	<u>2025</u>	<u>2024</u>
Tagihan kontijensi:		
Fasilitas Pinjaman Yang Belum Ditarik		
Bunga Kredit yang diberikan		
Pendapatan Bunga Dalam Penyelesaian	27.810.469.016	23.856.910.968
Agunan Proses Penyelesaian Kredit		
Aset Produktif yang Dihapusbukukan		
Kredit yang diberikan	8.764.305.880	8.787.995.051
Pendapatan Bunga Kredit Hapus Buku	1.828.874.192	1.831.570.465
Lainnya	4.462.650.235	126.000.000
Jumlah Tagihan Kontijensi	<u>42.866.299.323</u>	<u>34.602.476.484</u>

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D. UMUM

D.1 Pendirian Perusahaan

PT. BPR Chandra Muktiartha berlokasi di Jl. Gedong Kuning No. 150 A Banguntapan, Bantul, DIY. Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 73 Tanggal 13 April 1993 dibuat dihadapan Raden Mas Surjanto Partaningrat, Sarjana Hukum, Notaris di Yogyakarta. Kemudian dirubah dengan Akta perubahan Nomor: 75 oleh Notaris yang sama pada tanggal 12 Juli 1993 untuk mendapat persetujuan/ pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor: C2-7869.HT.01.01.TH.93 dikeluarkan pada tanggal 28 Agustus 1993. PT. BPR Chandra Muktiartha berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir yang termaktub dalam Akta No. 89 tertanggal 15 Maret 2023 dibuat di hadapan Stefanus Yuwono Tedjo Saputro., ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Sarjana Hukum di Semarang yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat nomor : AHU-AH.01.09-0102755 tanggal 18 Maret 2023 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Terbatas BPR Chandra Muktartha. Dalam RUPS tersebut memutuskan pengangkatan kembali anggota dewan direksi dan komisaris. Pada tanggal 19 Desember 2024 BPR terdapat RUPS yang menyatakan perubahan nama dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. RUPS tersebut disahkan dalam Akta No.24 tanggal 24 Februari 2025 oleh Notaris Stefanus Yuwono Tedjo Saputro., ST.,SH.,MBA.,MSIS.,MKn.,MH Sarjana Hukum di Semarang yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.03-0041212 tanggal 11 Februari 2025.

D.2 Tempat dan Kedudukan

PT. BPR Chandra Muktiartha berkedudukan di :

a. Kantor Pusat

Jl. Gedongkuning No 150A, Banguntapan,Bantul, D.I. Yogyakarta, Indonesia,(0274) 376276 / 385192

b. Kantor Cabang

- Kantor Cabang Wonosari, beralamat di Jl. MGR. Sugiyopranoto No.66 Baleharjo, Wonosari, Gunung Kidul, D.I. Yogyakarta, Indonesia, (0274) 391566
- Kantor Cabang Kota Yogyakarta, beralamat di Jl. Letjen Suprpto No.48 Ngampilan, Kota Yogyakarta, D.I. Yogyakarta, Indonesia, (0274) 5304727

c. Kantor Kas

- Kantor Kas Karangmojo Wonosari, beralamat di Jl. Karangmojo - Wonosari km 0.5 Gunungkidul D.I Yogyakarta Indonesia, (0274) 29102487
- Kantor Kas Playen , beralamat di Jl. Manthous, Jatisari, RT 16 RW 04 Playen, Playen Gunungkidul Indonesia, (0274) 2903297.

D.3 Perijinan Usaha

Dalam melaksanakan usahanya PT. BPR Chandra Muktiartha memiliki perjanjian sebagai berikut:

1. Ijin Menjalankan Usaha Nomor:Kep-173/Km.17/1994 yang dikeluarkan oleh Direktur Jendral Lembaga Keuangan, Departemen Keuangan Republik Indonesia pada tanggal 28 Juni 1994.
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Departement Keuangan Republik Indenesia Direktorat Jendral Pajak Kantor Pelayanan Yogyakarta dengan Nomor 01.599.238.1-543.000.
3. Nomor Induk Berusaha (NIB) 0403220043353 tertanggal 4 Maret 2022.

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. UMUM (Lanjutan)

D.4 Modal BPR

Modal Dasar Bank telah mengalami perubahan beberapa kali terakhir berdasarkan Akta Nomor 100 Tanggal 31 Desember 2021 dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputra, ST., SH., MBA., M.Sis., M.Kn., MH., Notaris di Semarang modal disetor yaitu berjumlah Rp50.000.000.000,- yang terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) lembar saham @ Rp1.000.000,-. Adapun yang ditempatkan dan disetor sebesar 20.000 (dua puluh ribu) lembar saham sebagai berikut :

Nama	Lembar Saham	Nominal @ Rp1.000.000	%
Tn. Drs. Agus Pramono	9.133	9.133.000.000	45,67%
Tn. Halim Susanto	6.867	6.867.000.000	34,33%
PT Merdeka Jaya	4.000	4.000.000.000	20,00%
Modal Disetor	20.000	20.000.000.001	100%

Sampai dengan 31 Desember 2025 tidak terdapat perubahan modal disetor

D.5 Susunan Pengurus dan Karyawan

Susunan Pengurus perseroan terdapat perubahan berdasarkan Akta Nomor 14 tanggal 9 Juli 2025 dihadapan Notaris Stefanus Yuwono Tedjosaputra, ST., SH., MBA., M.Sis., M.Kn., MH., Notaris di Semarang dan telah mendapatkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan No. AHU-AH.01.09-0312365 tanggal 17 Juli 2025, dengan susunan kepengurusan Bank per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris :	Masa Jabatan
- Komisaris Utama : Tn. Fransiscus Xaverius Soewardi Wakidin	(9-7-2025 s.d 9-7-2028)
- Komisaris : Tn. Ch. Bagus Anggara Jita	(9-7-2025 s.d 9-7-2028)

Direksi :

- Direktur Utama :	
- Direktur :	
- Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ny. Cicilia Wiwik	(s.d 19-5-2028)

Atas Nama Tn. Kus Sentono Halim, SE sudah tidak menjabat Direktur sesuai RUPSLB Tanggal 01 Desember 2025.

Sampai pada akhir pemeriksaan, PT. BPR Chandra Muktiartha memiliki karyawan berjumlah 146 karyawan dengan rincian sebagai berikut :

- Karyawan Tetap :	117
- Karyawan Kontra :	29

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

D.6 Penyajian Kembali Laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2025, Bank telah menerapkan SAK Entitas Privat (SAK EP) sebagai kerangka pelaporan keuangan, menggantikan SAK Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Transisi ini merupakan perubahan kerangka pelaporan keuangan yang signifikan. SAK EP (Entitas Privat) menggantikan SAK ETAP dengan beberapa penyesuaian pada instrumen keuangan.

PT. BPR Chandra Muktiartha menggunakan prinsip penyesuaian tersebut dengan metode retrospektif yaitu dari dimulainya periode praktis paling awal. Oleh karena itu, entitas mengabaikan porsi penyesuaian kumulatif atas aset, liabilitas, dan ekuitas yang timbul sebelum tanggal berlakunya SAK EP.

Akun	2024	Penyesuaian/ Reklasifikasi		2024
	SAK ETAP	D	K	SAK EP
PBYAD	3.362.476.947		3.362.476.947	-
Aset Lain-Lain-PBYAD		3.362.476.947		3.362.476.947
Provisi	(1.196.271.786)	1.196.271.786		1.196.271.786
Biaya Transaksi	186.517.855		186.517.855	-
PBYD	(2.838.937.776)	2.838.937.776		-
KYD		186.517.855	4.035.209.562	(3.848.691.707)
PPKA ABA	(123.512.497)	123.512.497		
CKPN ABA			123.512.497	(123.512.497)
PPKA KYD	(13.700.847.547)	13.700.847.547		-
CKPN KYD			13.700.847.547	(13.700.847.547)
Utang Bunga	972.256.822	972.256.822		-
Utang Pajak	472.644.182	472.644.182		-
Liabilitas Lain			1.444.901.004	1.444.901.004
Beban PPKA	3.488.162.875		3.488.162.875	-
Beban CKPN		3.488.162.875		3.488.162.875
				-
Total		26.341.628.288	26.341.628.288	

LAMPIRAN

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

1. Perkembangan Usaha

a. Total asset

Total aset PT. BPR Chandra Muktiartha per 31 Desember 2025, mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut :

Total asset tahun 2025	328.977.475.569
Total asset tahun 2024	387.082.393.257
Peningkatan (Penurunan)	-58.104.917.687
Persentase Peningkatan (penurunan)	-15,01%

b. Penghimpunan Dana

Jumlah dana pihak ketiga yang dihimpun PT. BPR Chandra Muktiartha 31 Desember 2025, yaitu deposito dan tabungan dengan rincian sebagai berikut :

	Deposito	Tabungan
Dana yang dihimpun tahun 2025	254.039.165.981	37.811.803.260
Dana yang dihimpun tahun 2024	317.190.710.159	34.017.322.941
Peningkatan (Penurunan)	(63.151.544.178)	3.794.480.319
Persentase Peningkatan (penurunan)	-19,91%	11,15%

c. Pemberian kredit

Jumlah pinjaman yang diberikan PT. BPR Chandra Muktiartha 31 Desember 2025, mengalami peningkatan, dengan rincian sebagai berikut :

Kredit yang diberikan tahun 2025	250.915.632.931
Kredit yang diberikan tahun 2024	333.530.803.590
Peningkatan (Penurunan)	-82.615.170.659
Persentase Peningkatan (penurunan)	-24,77%

2. Analisa Likuiditas

a. Cash Ratio

Alat Likuid

Kas	650.803.500
Penempatan pada bank lain (giro dan tabungan, dikurangi tabungan bank lain)	24.569.599.072
Jumlah	25.220.402.572

Hutang Lancar

Liabilitas segera dibayar	943.830.664
Tabungan	37.811.803.260
Deposito berjangka	254.039.165.981
Jumlah	292.794.799.905
Cash Ratio	8,61%

b. Rasio total kredit yang diberikan terhadap dana yang diterima (Loan to Deposit Ratio)

Loan

Jumlah kredit yang diberikan	250.915.632.931
------------------------------	-----------------

Deposit

Simpanan pihak ketiga (non bank)

Tabungan	37.811.803.260
Deposito berjangka	254.039.165.981
Jumlah	291.850.969.241
Loan to deposit Ratio	85,97%

PT BPR CHANDRA MUKTIARTHA
ANALISA LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL 31 DESEMBER 2025

3. a. Rasio Rentabilitas

Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO)

Beban operasional	41.131.374.987	
Pendapatan operasional	43.102.365.651	
BOPO		95,43%

b. Batas maksimum pemberian kredit

Modal inti	26.710.394.791	
Modal pelengkap	630.491.217	
Jumlah Modal		27.340.886.008

Pihak terkait (10%)	2.734.088.601	
Pihak tidak terkait (20) %	5.468.177.202	

c. Return On Asset (ROA)

Rata-Rata Aset		370.010.825.298
Laba Sebelum Pajak		1.987.497.017
Return On Asset (ROA)		0,54%

d. Perhitungan NIM (Net Interest Margin)

NIM		3,60%
------------	--	--------------

e. Rasio CKPN Kredit terhadap PPKA

CKPN	9.504.685.642	
PPKA	15.468.581.239	
		61%

f. NON PERFORMING LOAN(NPL)/KREDIT NON LANCAR :

RINCIAN NPL:

Kurang Lancar	8.681.133.519	
Diragukan	10.378.586.801	
Macet	81.720.500.009	
Jumlah NPL Gross		100.780.220.328

OUTSTANDING KREDIT/KREDIT YG DIBERIKAN(Gross)	248.101.547.099	
------------------------------------------------------	------------------------	--

RASIO NPL

Gross		40,62%
Net		34,63%



INDARTO DAN YUDHIKA
Registered Public Accountant
Audit, Tax, Management Consultant
Kep. 1323/KM.1/2021

Yogyakarta, 02 April 2026

Laporan nomor : 00098A/2.1358/0906-3/ATH/IV/2026

Hal : *Management Letter*

Kepada Yth

Dewan Komisaris dan Direksi

PT. BPR Chandra Muktiartha


Kami telah mengaudit Laporan Posisi Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha tanggal 31 Desember 2025, serta Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan telah menerbitkan laporan kami No: 00098/2.1358/AU.8/07/0906-3/1/IV/2026 pada tanggal 02 April 2026.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit kami atas Laporan Keuangan PT. BPR Chandra Muktiartha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, kami melakukan pemahaman atas pengendalian internal, pengujian kewajaran pembukuan, dan penilaian operasi sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pendapat terhadap laporan keuangan. Struktur pengendalian internal, kewajaran pembukuan, dan pelaksanaan operasi tersebut merupakan tanggung jawab manajemen.

Dari pemahaman tersebut, kami menemukan permasalahan yang kami pandang merupakan kondisi yang perlu diperhatikan. Kondisi yang dilaporkan dalam lampiran *management letter* mencakup permasalahan yang kami temukan, kekurangan dalam rancangan dan pelaksanaan struktur pengendalian internal, pembukuan, dan operasi yang menurut pendapat kami masih perlu ditingkatkan ke depannya.

Surat *management letter* ini ditujukan untuk memberikan informasi kepada Dewan Komisaris, Manajemen, dan bukan untuk disajikan pada pihak-pihak yang tidak berkompeten di luar PT. BPR Chandra Muktiartha. Hal ini untuk mencegah kemungkinan timbulnya salah pengertian dari pihak-pihak yang kurang memahami mengenai tujuan dan keterbatasan dari suatu pengendalian intern dan evaluasi serta tes yang kami lakukan atas pengendalian intern tersebut.

KAP Indarto Dan Yudhika
Managing Partner


Indarto Waluyo, M.Acc, Ak, CPA, CA, CPI.
MRAP. AP.0906

Adapun rincian temuan dan rekomendasi PT. BPR Chandra Muktiartha adalah sebagai berikut:

1. KEKOSONGAN JABATAN DIREKTUR UTAMA

Kondisi (Temuan): Berdasarkan penelaahan terhadap akta susunan pengurus dan dokumen kepegawaian selama periode audit tahun 2025, kami menemukan bahwa saat ini belum terdapat pejabat definitif yang menduduki posisi Direktur Utama. Operasional BPR saat ini hanya dijalankan oleh anggota Direksi yang tersisa/pelaksana tugas.

Kriteria:

1. **POJK Nomor 7 Tahun 2024** tentang Bank Perkreditan Rakyat, Pasal 44 menyebutkan bahwa jumlah anggota Direksi BPR paling sedikit 2 (dua) orang dan salah satunya wajib diangkat sebagai Direktur Utama.
2. **POJK Nomor 4 Tahun 2024** (atau peraturan Tata Kelola BPR terbaru yang relevan) mengenai Penerapan Tata Kelola bagi BPR, yang mewajibkan keutuhan susunan pengurus untuk memastikan berjalannya fungsi pengawasan dan pengambilan keputusan strategis yang independen dan efektif.

Akibat (Risiko):

1. **Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*):** BPR melanggar ketentuan OJK yang dapat berakibat pada pengenaan sanksi administratif, penurunan tingkat kesehatan bank (faktor Tata Kelola/GCG), hingga pembatasan kegiatan usaha oleh OJK.
2. **Risiko Operasional & Strategis:** Terhambatnya pengambilan keputusan strategis yang membutuhkan otorisasi Direktur Utama.

Rekomendasi: Kami merekomendasikan agar Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Pengendali (PSP) segera menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk menunjuk calon Direktur Utama. Selanjutnya, segera ajukan proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) kepada OJK agar kekosongan jabatan ini dapat segera diakhiri.

Tanggapan:

Manajemen memahami dan sependapat dengan temuan yang disampaikan terkait belum terisinya posisi Direktur Utama secara definitif. Kondisi ini terjadi karena proses penjangkaran dan penetapan calon Direktur Utama memerlukan kehati-hatian, termasuk mempertimbangkan kriteria kompetensi, integritas, serta pemenuhan persyaratan regulator. Sebagai langkah mitigasi sementara, operasional BPR tetap berjalan di bawah koordinasi Direksi yang ada dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

2. MASIH TERDAPAT KETIDAKSESUAIAN FORMAT LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAK EP DAN PA BPR

Kondisi (Temuan): Berdasarkan hasil revidi atas draf Laporan Keuangan BPR tahun 2025, kami menemukan bahwa:

1. Penamaan beberapa akun (*Chart of Accounts / COA*) belum dimutakhirkan.

2. Penyajian Laporan Arus Kas masih menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*) atau belum diklasifikasikan dengan tepat.

Kriteria:

1. **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP)** yang telah berlaku efektif secara mandatori per 1 Januari 2025. SAK EP mensyaratkan entitas (termasuk BPR) untuk menyajikan Laporan Arus Kas, di mana untuk aktivitas operasi dianjurkan menggunakan metode langsung (*direct method*).
2. **Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR)** terbaru yang merujuk pada SAK EP, yang telah menetapkan standar tata nama akun (COA), pengakuan, dan penyajian laporan keuangan khusus untuk industri BPR.

Akibat (Risiko):

1. Laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan dengan standar industri dan tidak sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku di Indonesia untuk BPR.
2. Terdapat potensi salah saji (reklasifikasi) yang signifikan, yang jika tidak diperbaiki, dapat memengaruhi opini auditor (Opini Wajar Dengan Pengecualian).
3. Terhambatnya proses pelaporan ke sistem pelaporan OJK karena ketidakcocokan *mapping* COA.

Rekomendasi:

1. Manajemen harus segera melakukan pemetaan ulang (*re-mapping*) COA pada *Core Banking System* (CBS) BPR agar selaras dengan PA BPR yang berbasis SAK EP.
2. Mengubah penyajian Laporan Arus Kas untuk aktivitas operasi menjadi metode arus kas langsung (*direct method*) dengan merinci penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto (misal: kas diterima dari nasabah, kas dibayarkan untuk bunga, kas dibayarkan untuk beban pegawai, dll).

Tanggapan:

Sependapat dengan temuan terkait belum dimutakhirkannya penamaan akun (Chart of Accounts/COA) serta penyajian Laporan Arus Kas yang belum sepenuhnya mengacu pada ketentuan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat (SAK EP) dan Pedoman Akuntansi BPR (PA BPR) terbaru dan akan menindaklanjuti rekomendasi terkait.

3. KEWAJIBAN PENDAFTARAN PENGUSAHA KENA PAJAK (PKP) TERKAIT PENJUALAN AYDA/ASET TETAP

Kondisi (Temuan): Berdasarkan Laporan Laba Rugi BPR tahun 2025, total peredaran bruto (omset/pendapatan operasional) BPR telah melebihi Rp 4.800.000.000,- (Empat Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah). Namun, hingga saat audit ini dilakukan, BPR belum mendaftarkan diri untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Di sisi lain, hal ini diperlukan untuk menghindari risiko temuan pajak apabila terdapat transaksi penjualan AYDA maupun asset.

Kriteria:

1. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 164 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak (sebagai pembaruan batasan Pengusaha Kecil), mewajibkan pengusaha yang memiliki

peredaran bruto melebihi Rp 4,8 Miliar dalam 1 tahun buku untuk melaporkan usahanya dan dikukuhkan sebagai PKP. (Meskipun jasa perbankan sebagian besar dikecualikan dari PPN, BPR tetap wajib PKP jika omset total melebihi *threshold*).

2. **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 41 Tahun 2023** tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) oleh Kreditur kepada Pembeli Agunan. Aturan ini menegaskan bahwa penjualan AYDA oleh Bank/Lembaga Keuangan terutang PPN (umumnya menggunakan besaran tertentu yang dipungut dan disetorkan oleh Kreditur).

Akibat (Risiko):

1. Jika BPR melakukan penjualan AYDA atau Aset Tetap (inventaris/kendaraan) namun belum menjadi PKP, BPR tidak dapat menerbitkan Faktur Pajak.
2. Risiko pemeriksaan pajak yang dapat berujung pada sanksi administratif dan denda bunga dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) atas Pajak Keluaran (PPN) yang tidak dipungut/disetorkan sejak saat BPR seharusnya dikukuhkan sebagai PKP.

Rekomendasi:

1. BPR harus segera mengajukan permohonan pengukuhan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat BPR terdaftar.
2. Menyiapkan sistem dan administrator untuk aplikasi *e-Faktur*.
3. Manajemen harus membuat SOP Perpajakan khusus terkait skema penjualan AYDA dan Penjualan Aset Tetap, untuk memastikan pungutan PPN sebesar tarif yang ditentukan regulasi (sesuai PMK 41/2023) dipotong dari hasil penjualan lelang/bawah tangan dan disetorkan ke Kas Negara secara tepat waktu.

Tanggapan:

Sependapat dengan KAP dan mempertimbangkan untuk pembuatan PKP.